



LAPORAN KINERJA 2023

Disusun oleh:
INSPEKTORAT UTAMA
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270

TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

INSPEKTORAT UTAMA

TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Inspektorat Utama untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Inspektorat Utama.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 22 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
INSPEKTUR II
Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dan komitmen Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja selama tahun 2023. Laporan Kinerja ini juga sebagai salah satu media komunikasi untuk menyampaikan informasi akuntabilitas kinerja dalam memenuhi harapan akan terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Penetapan ukuran kinerja, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja di setiap awal tahun berjalan, merupakan acuan dan komitmen kami dalam mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai kinerja secara optimal.

Melalui Laporan Kinerja ini, diuraikan rencana kinerja, pencapaian kinerja, realisasi anggaran, inovasi dan *achievement* Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI sepanjang tahun 2023.

Terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah bekerja dengan optimal untuk tercapainya kinerja khususnya pada Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI sepanjang tahun 2023. Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat dan juga sebagai media evaluasi untuk mendorong peningkatan kualitas dan akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Jenderal DPR RI.

Jakarta, 23 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Plh. Inspektur Utama

Drs. Mohammad Djazuli, M.Si.

TIM PENYUSUN

Pengarah

Drs. Mohammad Djazuli, M.Si.

Penanggung Jawab

Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn

Ketua

Endah Sri Lestari, S.H., M.Si.

Sekretaris

Vita Fathiyah Yuniati, S.E., M.Ak.

Anggota

Antonius Deryal Gamanno, S.E.

Suretianto, S.Kom.

Haryanti

Zelka Sevrina, S.E.

Alisa Fatimah, S.E.

Sri Nastiti Tri Nurasih, S.E.

Sri Hartati Agustin

Tim Layout

Mikhail Muhamad Jibril, A.Md., Ak.

DAFTAR ISI

III

Kata Pengantar
Plh. Inspektur Utama

VI

Ringkasan Eksekutif

13 - 49

Bab III
Akuntabilitas Kinerja

1 - 7

Bab I
Pendahuluan

50

Bab IV
Penutup

8 - 12

Bab II
Perencanaan Kinerja

51

Lampiran

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahun 2023 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran. Selain itu, Laporan Kinerja ini merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis dalam Renstra Inspektorat Utama.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Inspektorat Utama menetapkan 4 (empat) Sasaran Program dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja (IK). Gambaran capaian kinerja Inspektorat Utama Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	1.	Indeks Reformasi Birokrasi	A 87,20	BB 78,05*	89,50%
		2.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (75.00)	B (67,46)	89,94%
		3.	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK	5	5	100%
		4.	Tingkat Kepatuhan LHKPN	100%	100%	100%
		5.	Tingkat kepatuhan LHKASN	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	1.	Skor maturitas SPIP	Level 3 (3,22)	Level 3 (3,270)	101,55%
3.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	1.	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK	89%	90,61%	101,81%
		2.	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP	67%	82,5%	123,13%
4.	Meningkatnya kualitas dan kapabilitas organisasi Inspektorat Utama	1.	Nilai Evaluasi AKIP di Lingkup Inspektorat Utama	BB (75.00)	BB (72.15)	96,2%
		2.	Tingkat penilaian kapabilitas APIP	Level 3 (3.1)	Level 3 (3.045)	98.23%

Tabel 1. Capaian Kinerja Inspektorat Utama 2023

*realisasi 2022

Program	Anggaran	Efisiensi Anggaran	Anggaran	Realisasi	Capaian
Program Dukungan Manajemen	Rp9.141.368.000,00	-	Rp9.141.368.000,00	Rp9.131.707.071,00	99.89%

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Inspektorat Utama Tahun 2023 secara umum telah memenuhi target yang ditetapkan. Dari 4 (empat) sasaran dan 10 (sepuluh) indikator kinerja, 3 (tiga) indikator kinerja telah melampaui target yang ditetapkan yaitu persentase skor maturitas SPIP, persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK dan APIP, namun terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang belum tercapai 100% yaitu nilai evaluasi akuntabilitas kinerja, nilai evaluasi AKIP di lingkup Inspektorat Utama dan tingkat penilaian kapabilitas APIP.

Capaian kinerja Inspektorat Utama pada tahun 2023 didukung oleh anggaran sebesar Rp9.141.368.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp9.131.707.071,00 atau 99,89%.

Keberhasilan ini, merupakan hasil dari komitmen dan kerja cerdas di jajaran Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI. Kedepan, Inspektorat Utama berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan kinerjanya, antara lain:

1. Penguatan Tata Kelola Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi.
2. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko yang disesuaikan dengan struktur penganggaran.
3. Penguatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Utama yang berkualitas.
4. Peningkatan Kualitas Laporan Hasil Pengawasan Internal yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Pengawasan internal sebagai salah satu fungsi manajemen pada organisasi penyelenggara pemerintahan, memegang peranan penting dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi, serta mencegah dilakukannya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penyelenggaraan organisasi yang baik dan amanah (*good governance*).

Sebagai unsur yang bertugas untuk melakukan pengawasan internal, Inspektorat Utama hadir untuk memperkuat Setjen DPR RI menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), berpegang pada asas akuntabilitas dan transparansi untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme sesuai arah kebijakan dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi di Indonesia (pemerintahan berkelas dunia).

Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasannya lainnya di Sekretariat Jenderal DPR RI. Inspektorat Utama juga melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal DPR RI dan/atau Pimpinan DPR RI.

Pada tahun 2023, Inspektorat Utama melakukan berbagai macam kegiatan pengawasan yang tercermin dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko yang telah ditetapkan. PKPT Berbasis Risiko merupakan gambaran rencana kerja yang akan dicapai oleh Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI pada Tahun 2023, sehingga dari capaian PKPT ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah serta berkontribusi terhadap efektivitas dan efisiensi pada proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern di Sekretariat Jenderal DPR RI.

Kegiatan pengawasan yang terangkum dalam PKPT tidak sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, hal ini bisa terjadi dikarenakan dalam perjalanannya terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi perubahannya. Seperti banyaknya permintaan kegiatan pendampingan/*mandatory* dari Pimpinan DPR RI/Pimpinan Setjen DPR RI dan juga beberapa unit kerja,

sehingga hal ini berdampak pada pelaksanaan kegiatan yang sudah terencana.

Banyaknya permintaan pendampingan/konsultasi maupun penugasan *mandatory*, menunjukkan bahwa peran Inspektorat sebagai aparat pengawasan intern di Setjen DPR RI telah berperan optimal dalam membangun *trust* kepada auditi. Perubahan juga bisa terjadi dalam situasi dan kondisi tertentu seiring dengan dinamika yang terjadi pada organisasi.

Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Utama Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Utama sepanjang tahun 2023. Dan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, laporan ini dipublikasikan untuk stakeholder dan masyarakat luas melalui *website* ittama.dpr.go.id.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja.

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/3 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja (PK), Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

Inspektorat Utama merupakan unsur pengawasan intern di Sekretariat Jenderal DPR RI (Setjen DPR RI), yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal DPR RI. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 21 dan pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 20

Februari 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 30), serta Pasal 310 dan Pasal 311 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 21 September 2023.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023, Inspektorat Utama sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.



Gambar 1. Fungsi Inspektorat Utama Setjen DPR RI
(sumber : Data yang diolah oleh Ittama)

Inspektorat Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023, terdiri atas:

- a. Inspektorat I;
- b. Inspektorat II,
- c. Bagian Administrasi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Inspektorat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Deputi Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif, serta Pusat Teknologi Informasi.

Inspektorat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318 mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern bidang keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Deputi Bidang Persidangan dan Badan Keahlian.

Bagian Administrasi Inspektorat Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 322 mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan dukungan tata usaha untuk kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat Utama, serta tindak lanjut dan pelaporan Inspektorat Utama. Berikut adalah struktur organisasi Inspektorat Utama:



Gambar 2. Struktur organisasi Inspektorat Utama
(Sumber: Data yang diolah oleh Ittama)

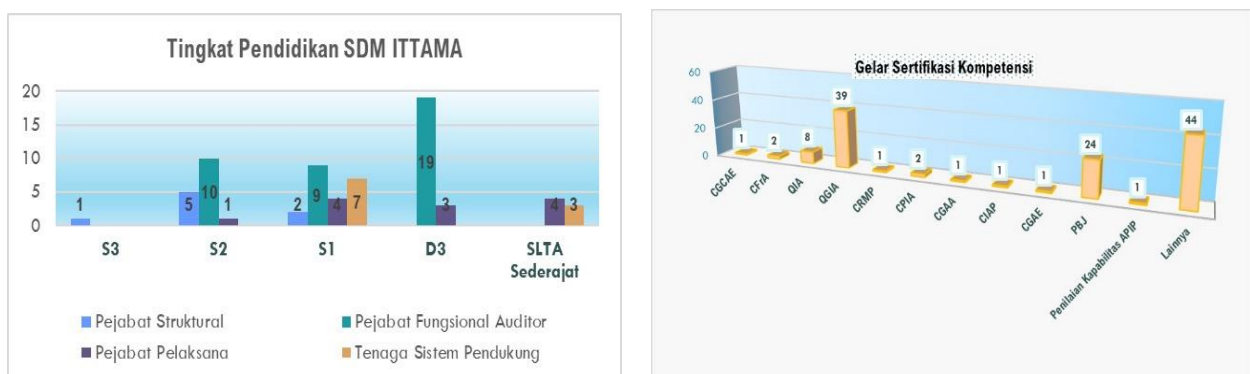
Berdasarkan struktur organisasi Inspektorat Utama Setjen DPR RI di atas, secara keseluruhan SDM Inspektorat Utama terdapat 68 (enam puluh delapan) personel dan sebagian besar SDMnya telah dibekali oleh pelatihan yang memadai.

1.4 Aspek Strategis dan Permasalahan yang dihadapi

Dalam mencapai target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023, Inspektorat Utama menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang menjadi aspek strategis dalam mencapai target kinerja. Aspek strategis yang dihadapi oleh Ittama dalam pencapaian target kinerja antara lain:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia di Inspektorat Utama, baik secara kuantitas maupun kualitas sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Utama. Secara keseluruhan, komposisi SDM yang ada di lingkup Inspektorat Utama saat ini terdiri dari Inspektur Utama, Inspektur I, Inspektur II, Pejabat Struktural, Jabatan Fungsional Auditor, Pejabat Pelaksana. Total SDM Inspektorat Utama berjumlah 68 (enam puluh delapan) orang terdiri dari 20 (dua puluh) orang jabatan struktural, 2 (dua) orang auditor ahli utama, 2 (dua) orang madya, 7 (tujuh) auditor muda, 8 (delapan) auditor pertama dan 19 (sembilan belas) auditor terampil dan 10 (sepuluh) orang tenaga sistem pendukung. Berikut adalah komposisi SDM berdasarkan tingkat Pendidikan dan gelar sertifikasi kompetensi:



Gambar 3. Grafik Tingkat Pendidikan dan Gelar Sertifikasi SDM Ittama (sumber : Data yang diolah oleh Ittama)

Berdasarkan data di atas, secara kualitas SDM Ittama perlu ditingkatkan baik melalui peningkatan jenjang pendidikan maupun sertifikasi kompetensinya yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Utama. Secara kuantitas SDM Ittama dapat dijelaskan sebagai berikut berdasarkan analisa dan beban kerja:

NO	JABATAN	JUMLAH		SELISIH
		IDEAL	TERSEDIA	
1	Auditor Utama	2	2	0
2	Auditor Madya (4 GT x 1 Auditor)	4	2	2
3	Auditor Muda (4 GT x 3 Auditor)	12	7	5
4	Auditor Pertama/Auditor Terampil	36	27	9
5	Penelaah Teknis Kebijakan Inspektorat I	2	0	2
6	Pengelola Data dan Informasi Inspektorat I	2	2	0
7	Pengadministrasi Perkantoran Inspektorat I	2	0	2
8	Penelaah Teknis Kebijakan Inspektorat II	2	2	0
9	Pengelola Data dan Informasi Inspektorat II	2	1	1
10	Pengadministrasi Perkantoran Inspektorat II	2	0	2
11	Penelaah Teknis Kebijakan Sub Tata Usaha Bagian Adm. Ittama	4	2	2
12	Pengelola Data dan Informasi Sub Tata Usaha Bagian Adm. Ittama	4	1	3
13	Pengadministrasi Perkantoran Sub Tata Usaha Bagian Adm. Ittama	4	0	4
14	Penelaah Teknis Kebijakan Sub Tindak Lanjut dan Pelaporan Bagian Adm. Ittama	4	3	1
15	Pengelola Data dan Informasi Sub Tindak Lanjut dan Pelaporan Bagian Adm. Ittama	2	1	1
16	Pengadministrasi Perkantoran Sub Tindak Lanjut dan Pelaporan Bagian Adm. Ittama	2	0	2

Tabel 2. Jumlah Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Inspektorat Utama
(sumber: Renstra Ittama 2020 – 2024 & SK Analisis Jabatan dan Beban Kerja)

Berdasarkan komposisi SDM di Ittama Setjen DPR RI, jika dibandingkan dengan jumlah ideal yang dibutuhkan, maka Ittama masih membutuhkan penambahan baik pada jabatan fungsional maupun jabatan struktural. Untuk kekurangan pada jabatan struktural, beberapa dipenuhi oleh tenaga sistem pendukung, namun secara kualitas belum memenuhi standar yang dibutuhkan untuk melaksanakan beban kerja yang ada. Sedangkan untuk jabatan fungsional akan dilakukan *assessment* dalam waktu dekat oleh BPKP untuk memenuhi porsi jabatan pada auditor madya dan muda.

2. Sarana dan Prasarana di Inspektorat II belum memadai

Inspektorat II memiliki total 19 (sembilan belas) orang fungsional Auditor di seluruh jenjang, namun pada pelaksanaan pengawasan Auditor belum sepenuhnya didukung dengan sarana prasarana yang memadai khususnya perangkat *laptop*. Selain itu, perlu dilakukan pengembangan kompetensi sumber daya manusia Inspektorat II dengan mengikutsertakan dalam pendidikan/pelatihan/*workshop*/seminar/*bimtek* terkait teknis pengawasan yang telah mempertimbangkan kompetensi Auditor yang berstandar nasional maupun internasional.

3. Perubahan Regulasi/Kebijakan

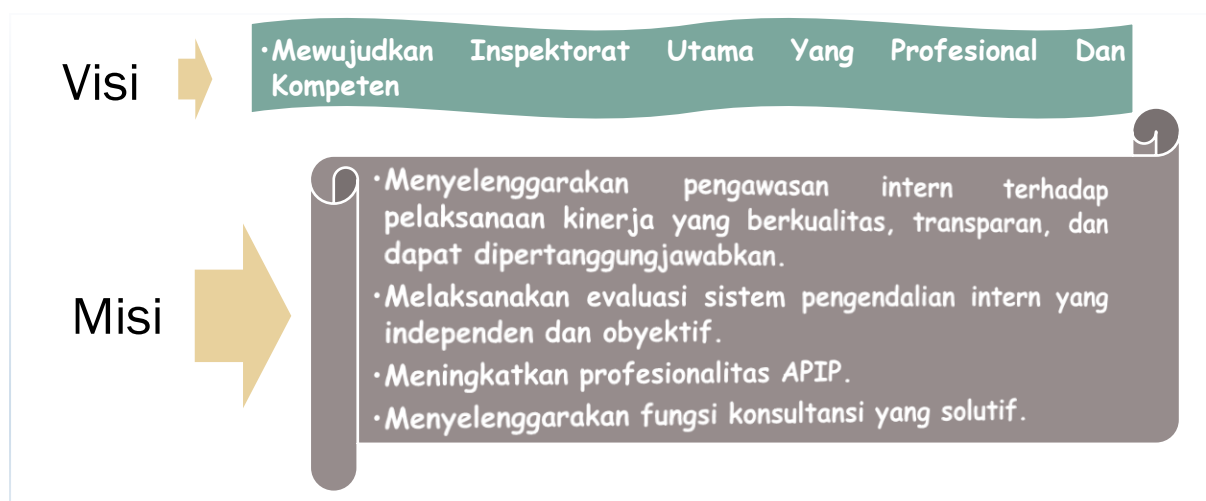
Pada pelaksanaan tugas pengawasan tahun 2023 terdapat beberapa perubahan regulasi/kebijakan terkait Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), Reformasi Birokrasi (RB), Zona Integritas (ZI), dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang menyebabkan pelaksanaan pengawasan tidak sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), sehingga perlu adanya strategi untuk mengatasi perubahan regulasi/kebijakan agar target yang ditetapkan tercapai.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

11.1 Rencana Strategis 2020-2024

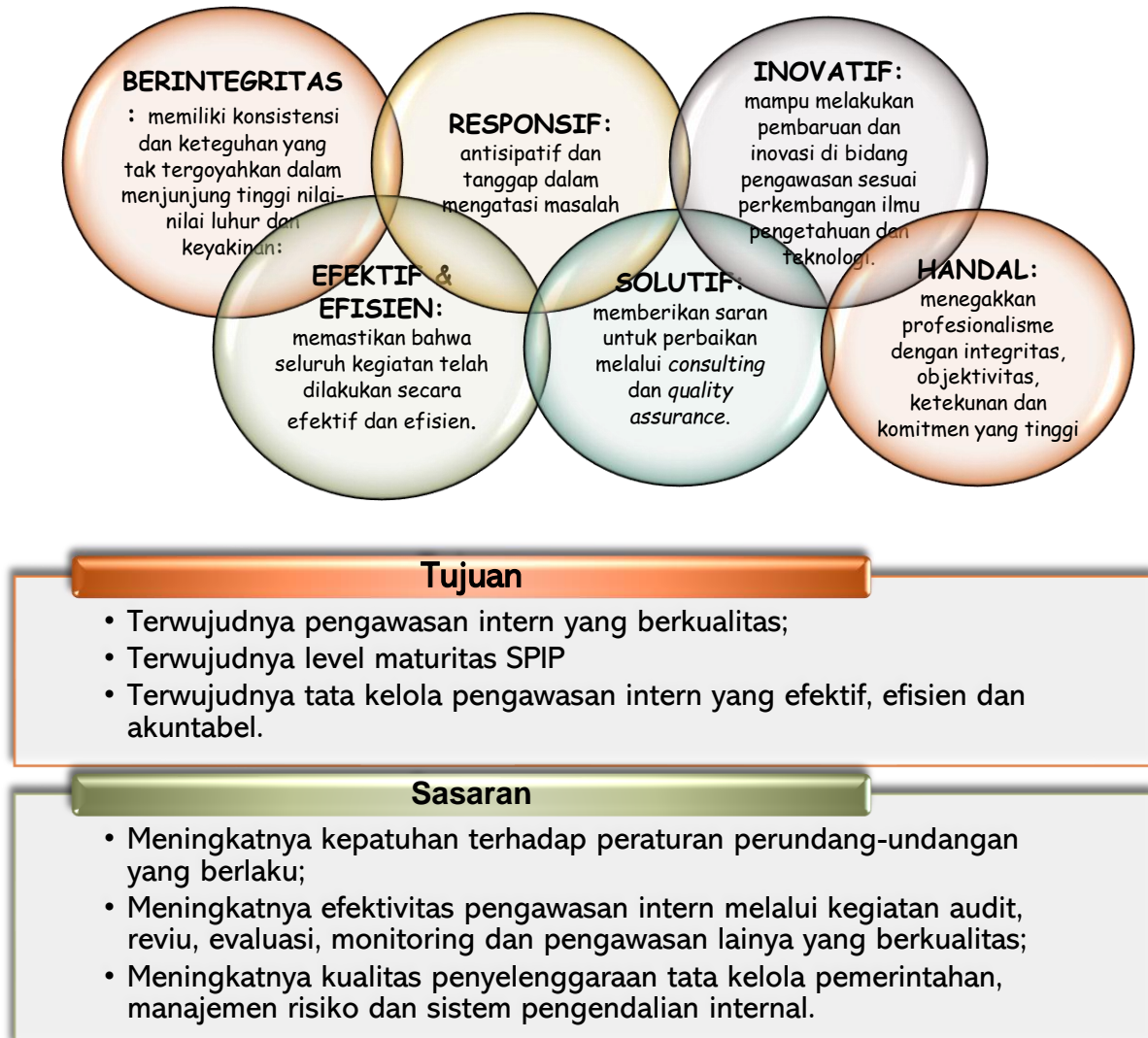
Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Utama Tahun 2020 – 2024 merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI dan sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki. Renstra disusun sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024 serta mengacu pada Renstra Setjen DPR RI tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Persekjen DPR RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Setjen DPR RI Tahun 2020-2024.

Visi Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan strategis. Visi memberikan gambaran konsistensi kinerja selama 5 (lima) tahun mendatang serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi Inspektorat Utama. Sedangkan Misi Inspektorat Utama adalah rumusan umum mengenai berbagai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Inspektorat Utama yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Adapun Visi dan Misi Inspektorat Utama yaitu sebagai berikut.



Gambar 4. Visi dan Misi Inspektorat Utama

Inspektorat Utama sebagai unit yang melaksanakan fungsi pengawasan internal di Setjen DPR RI memiliki slogan tersendiri yang diharapkan dapat diinternalisasikan dalam mengemban pelaksanaan tugas dan fungsinya. Budaya Kerja Inspektorat Utama adalah “BERSIH”.



Gambar 5. Budaya Kerja Inspektorat Utama “BERSIH”

Sasaran strategis di dalam Renstra memiliki indikator kinerja program serta target yang terbagi ke dalam beberapa kegiatan dan masing-masing memiliki sasaran, indikator dan target yang harus dicapai sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini:

SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN					TARGET AKHIR
			2020	2021	2022	2023	2024	2024
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik	Nilai Reformasi Birokrasi	BB	BB	A	A	AA	AA
		Unit Kerja Eselon II yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	2 unit kerja	6 unit kerja	10 unit kerja	14 unit kerja	18 unit kerja	18 unit kerja
	Terwujudnya tata kelola keuangan yang baik	Jumlah Unit Kerja Eselon II yang mengimplementasikan Manajemen Risiko	6 unit kerja	12 unit kerja	18 unit kerja	20 unit kerja	20 unit kerja	20 unit kerja
	Terwujudnya pengawasan Inspektorat Utama yang berintegritas dan akuntabel	Level Kapabilitas APIP (Maturitas IACM)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4
		Telaah Sejawat (Skor <i>Peer Review</i>)	-	-	-	Baik	-	Baik
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI	Hasil Evaluasi SAKIP	B	B	A	A	A	A
		Persentase tindak lanjut atas Rekomendasi Hasil Audit oleh Auditi	75%	80%	85%	90%	95%	95%
	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan anggaran dan aset/Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal DPR RI	Persentase temuan Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh Auditi	75%	80%	85%	90%	95%	95%
		Persentase temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti dalam 60 (enam puluh) hari	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Mewujudkan Tata Kelola Organisasi Inspektorat Utama	Sertifikasi Auditor	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Tingkat kepuasan auditi terhadap layanan Ittama	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
	Sarana dan Prasarana Inspektorat Utama memadai	Persentase sarana dan prasarana Ittama	75%	80%	85%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Anggaran Ittama yang optimal	Kinerja penyerapan anggaran Inspektorat Utama	96%	96%	96%	98%	98%	98%

Tabel 3. Target Kinerja Inspektorat Utama 2020-2024 (Renstra Ittama)
(Sumber : Renstra Inspektorat Utama Setjen DPR RI Tahun 2020-2024)

Berdasarkan Laporan ST Nomor 344A/PI.01/X/2023 tentang melaksanakan revisi rencana strategis Inspektorat Utama Tahun 2020-2024, hasil telaah renstra Ittama bahwa diperlukan beberapa pembaharuan dasar peraturan dan/atau ketentuan, perlu penyesuaian tentang analisa tentang arah kebijakan sekjen DPR RI yang berkaitan dengan Inspektorat Utama, terdapat ketidaksesuaian antara indikator kinerja dengan target antara Renstra Sekjen dengan Renstra Ittama, dapat melakukan pembaharuan atas data SDM dan kinerja yang telah tercapai.

Perbedaan indikator kinerja dengan target antara renstra Sekjen dengan renstra Ittama, menyebabkan adanya perbedaan antara renstra Ittama dengan Perjanjian Kinerja Ittama Tahun 2023 karena perjanjian kinerja mengikuti renstra Sekjen, berikut adalah perbedaan yang akan diperbaiki di Renstra Ittama pada tahun 2024 yaitu:

INDIKATOR KINERJA	TARGET				
	2020	2021	2022	2023	2024
Renstra Setjen					
Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK	-	4	5	5	6
Indeks Reformasi Birokrasi	-	BB	BB	A (87,20)	A (88,00)
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	-	B	B	BB (75,00)	BB (76,00)
Skor Maturitas SPIP	-	Level 3	Level 3	Level 3 (3,22)	Level 3 (3,28)
Tingkat Kapabilitas APIP	-	Level 3	Level 3	Level 3 (3,1)	Level 3 (3,2)
Renstra Ittama					
Level Internal Audit Capacity Model (IACM)	Level 3 (dengan catatan)	Level 3 (dengan catatan)	-	-	-

Tabel 4. Penyesuaian Indikator Kinerja Renstra Ittama Tahun 2024
(Sumber : Renstra Inspektorat Utama Setjen DPR RI Tahun 2020-2024)

11.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Berikut adalah Perjanjian Kinerja ITTAMA Tahun 2023:

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	1.	Indeks Reformasi Birokrasi	A (87,20)
		2.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (75.00)
		3.	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK	5
		4.	Tingkat Kepatuhan LHKPN	100%
		5.	Tingkat kepatuhan LHKASN	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	1.	Skor maturitas SPIP	Level 3 (3,22)
3.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	1.	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK	89%
		2.	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP	67%
4.	Meningkatnya kualitas dan kapabilitas organisasi Inspektorat Utama	1.	Nilai Evaluasi AKIP di Lingkup Inspektorat Utama	BB (75.00)
		2.	Tingkat penilaian kapabilitas APIP	Level 3 (3.1)

Tabel 5. Perjanjian Kinerja ITTAMA Tahun 2023
(Sumber: Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Satker Setjen)

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat beberapa indikator kinerja kegiatan dan target indikator kinerja kegiatan yang berbeda antara Renstra Ittama dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Perbedaan indikator kinerja disebabkan karena perbedaan pengukuran kinerja sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, sedangkan perbedaan target kinerja dikarenakan adanya penyesuaian target yang mempertimbangkan capaian realisasi tahun sebelumnya dan dinamika organisasi. Kedepannya, akan diselaraskan antara Renstra Ittama dengan Renstra Sekjen dan Perjanjian Kinerja Ittama, sehingga tidak ada lagi perbedaan indikator kinerja.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja Inspektorat Utama tercermin dalam capaian atas sasaran program/kegiatan yang didasarkan pada indikator kinerja yang targetnya sudah ditetapkan di dalam perjanjian kinerja dan alokasi anggaran yang telah disediakan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Inspektorat utama berupaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan/kegagalan) dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan uraian dan analisis capaian kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Berikut rangkuman capaian dan penjelasan setiap indikator kinerja per Sasaran Strategis Inspektorat Utama Setjen DPR RI tahun 2023:

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	1.	Indeks Reformasi Birokrasi	A 87,20	BB 78,05*	89,50%
		2.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB 75,00	B 67,46	89,94%
		3.	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK	5	5	100%
		4.	Tingkat Kepatuhan LHKPN	100%	100%	100%
		5.	Tingkat kepatuhan LHKASN	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	1.	Skor maturitas SPIP	Level 3 3,22	Level 3 3,270	101,55%
3.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	1.	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK	89%	90,61%	101,81%
		2.	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP	67%	82,5%	123,13%
4.	Meningkatnya kualitas dan kapabilitas organisasi Inspektorat Utama	1.	Nilai Evaluasi AKIP di Lingkup Inspektorat Utama	BB 75.00	BB 72.15	96,2%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
		2. Tingkat penilaian kapabilitas APIP	Level 3 3.1	Level 3 3.045	98,23%

*Realisasi 2022

Tabel 6. Capaian Kinerja ITTAMA Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Inspektorat Utama Tahun 2023 secara umum telah memenuhi target yang ditetapkan. Dari 4 (empat) sasaran dan 10 (sepuluh) indikator kinerja, 3 (tiga) indikator kinerja telah melampaui target yang ditetapkan yaitu persentase skor maturitas SPIP, persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK dan APIP, namun terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang belum tercapai 100% yaitu Indeks Reformasi Birokrasi, nilai evaluasi akuntabilitas kinerja, nilai evaluasi AKIP di lingkup Inspektorat Utama dan tingkat penilaian kapabilitas APIP.

Selanjutnya, apabila dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2021, 2022 dan tahun 2023, dapat dilihat sebagai berikut.

Sasaran	Indikator kinerja	Target			Realisasi			Capaian		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	1. Indeks Reformasi Birokrasi	BB	A (80,01)	A (87,20)	BB	BB (78,05)	BB* (78,05)	100%	97,55%	89,50%
	2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B (60,01)	BB (75,00)	B (65,31)	B 67,28	B (67,46)	100%	112,11%	89,95%
	3. Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK	4	6	5	4	4	5	100%	67%	100%
	4. Tingkat Kepatuhan LHKPN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	5. Tingkat kepatuhan LHKASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	1. Skor maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3 (3,22)	Level 3	Level 3	Level 3 (3.270)	100%	100%	101,55%
	2. Unit kerja dengan maturitas SPIP minimal level 3	2	2	-	3	4	-	150%	200%	-
Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	1. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK	70%	70%	89%	77%	86,75%	90,61%	110%	124%	101,81%

Sasaran	Indikator kinerja		Target			Realisasi			Capaian		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
	2.	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP	70%	50%	67%	46.59%	73.13%	82,5%	66.55%	146%	123,13%
Meningkatnya kualitas dan kapabilitas organisasi Inspektorat Utama	1.	Indeks RB di lingkup ittama	BB	A	-	BB	AA		100%	121.01%	-
	2.	Nilai Evaluasi AKIP di Lingkup Inspektorat Utama	B	B (60,01)	BB (75,00)	B	BB (70,90)	BB (72,15)	100%	118.14%	96,2%
	3.	Tingkat penilaian kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3 (3,1)	Level 3	Level 2	Level 3 (3.045)	100%	67%	98.22%

*Realisasi 2022

Tabel 7. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 sampai dengan 2023

Berdasarkan data di atas, target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Ittama dari tahun ke tahun selalu meningkat, hal ini dimaksudkan agar Ittama lebih tertantang dalam berkinerja. Dalam perjanjian kinerja tahun 2023 terdapat 2 (dua) indikator yang tidak ditetapkan di perjanjian kinerja yaitu Unit kerja dengan maturitas SPIP minimal level 3 dan Indeks RB di lingkup ittama, hal ini dikarenakan penilaian hanya dilakukan secara kesekjenan bukan per unit eselon 1.

Untuk capaian target dari tahun ke tahun, terlihat fluktuatif namun secara umum meningkat dan tercapai, hanya beberapa indikator yang tidak dapat tercapai dengan sempurna sesuai dengan target yang telah ditetapkan, seperti: indeks RB, nilai evaluasi akuntabilitas kinerja, nilai evaluasi AKIP ittama dan tingkat penilaian kapabilitas APIP.

Untuk capaian kinerja tahun 2023, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra Ittama adalah sebagai berikut.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN					CAPAIAN RENSTRA	
		2020	2021	2022	2023	2024	2023	
							Realisasi	%
	Nilai Reformasi Birokrasi	BB	BB	A	A 80.01	AA 90.01	BB* 78,05	86,71%

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN					CAPAIAN RENSTRA	
		2020	2021	2022	2023	2024	2023	
							Realisasi	%
Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik	Unit Kerja Eselon II yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	2 unit kerja	6 unit kerja	10 unit kerja	14 unit kerja	18 unit kerja	5 unit kerja	27,77%
Terwujudnya tata kelola keuangan yang baik	Jumlah Unit Kerja Eselon II yang mengimplementasikan Manajemen Risiko	6 unit kerja	12 unit kerja	18 unit kerja	20 unit kerja	20 unit kerja	21 unit kerja	105%
Terwujudnya pengawasan Inspektorat Utama yang berintegritas dan akuntabel	Level Kapabilitas APIP (Maturitas IACM)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 3 (3,045)	76.13%
	Telaah Sejawat (Skor Peer Review)	-	-	-	Baik	Baik	Baik (86,88)	100%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI	Hasil Evaluasi SAKIP	B	B	A	A 80.01	A 80.01	B 67,46	84.31%
	Persentase tindak lanjut atas Rekomendasi Hasil Audit oleh Auditi	75%	80%	85%	90%	95%	90,61%	90%
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan anggaran dan aset/Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal DPR RI	Persentase temuan Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh Auditi	75%	80%	85%	90%	100%	82,5%	82,5%
	Persentase temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti dalam 60 (enam puluh) hari	100%	100%	100%	100%	100%	90%	90%
Mewujudkan Tata Kelola Organisasi Inspektorat Utama	Sertifikasi Auditor	100%	100%	100%	100%	100%	-	
	Tingkat kepuasan auditi terhadap layanan Inspektorat Utama	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	-	
Sarana dan Prasarana Inspektorat Utama memadai	Persentase sarana dan prasarana Inspektorat Utama	75%	80%	85%	100%	100%	-	
Pengelolaan Anggaran Inspektorat Utama yang optimal	Kinerja penyerapan anggaran Inspektorat Utama	96%	96%	96%	98%	98%	99.89%	102%

*Realisasi tahun 2022

Tabel 8. Capaian Kinerja Tahun 2023
Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

Berdasarkan data di atas, bahwa capaian pada tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir renstra, baik yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2023 maupun yang tidak, rata-rata secara umum telah tercapai. Namun, masih

terdapat target yang pencapaiannya sangat rendah yaitu untuk indikator Unit Kerja Eselon II yang mendapatkan predikat WBK/WBBM. Capaian rendah ini dipengaruhi oleh unit kerja yang diusulkan tidak termotivasi dan memiliki kesiapan memadai untuk menjadi zona integritas, hal ini dikarenakan pada perjanjian kinerja unit kerja yang diusulkan menjadi zona integritas tidak terdapat indikator kinerja tersebut. Kedepannya, ittama sebagai tim pendamping dan tim penilai internal zona integritas akan melakukan pendampingan lebih intensif disertai dukungan dan komitmen seluruh pihak yang terkait.

Tahun 2023, Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI telah ditelaah seawat eksternal oleh Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik (BPS) sesuai Surat AAIPi Nomor 78/AAIPi/KTS/VIII/2023 Tanggal 7 Agustus 2023 perihal Penetapan APiP Penelaah dan Ditelaah Telaah Sejawat Ekstern DPN AAIPi Semester II Tahun 2023. Sebelumnya pada tahun 2022, Ittama juga telah dipercaya oleh Komite Telaah Sejawat Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (KTS AAIPi) untuk menjadi penelaah di Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI.

Telaah seawat ekstern ini, dilakukan dengan tujuan untuk menilai kesesuaian (*conformance*) praktik pengawasan intern terhadap standar, untuk memperbaiki dan/atau meningkatkan efektivitas penerapan kode etik auditor intern, efisiensi dan efektivitas kegiatan pengawasan intern, serta pemenuhan harapan para pemangku kepentingan terhadap APiP. Berdasarkan hasil TSE tahun 2023, nilai kesesuaian praktik pengawasan intern pada Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI terhadap standar adalah 86,88%, dengan kategori penilaian "Baik". dengan rincian nilai Standar Atribut adalah 88% dan nilai Standar Pelaksanaan adalah 86%.



Gambar 6. Dokumentasi Pelaksanaan Telaah Sejawat Eksternal Tahun 2023 Ittama Sekretariat Jenderal DPR RI ditelaah oleh Inspektorat Jenderal BPS RI

Selain itu, Ittama Setjen DPR RI telah dievaluasi oleh tim evaluasi BPKP atas penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada bulan Mei 2023. Hasil evaluasi penerapan JFA sesuai surat Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor

BPKP Nomor PE.09.03/LHP-158/JF/03/2023 tanggal 11 September 2023, diperoleh Skor Indeks Penerapan JFA pada Ittama Setjen DPR RI atas 4 (empat) aspek penerapan JFA sebesar **87,20** atau Kategori **Baik**, dengan uraian sebagai berikut.

No	Aspek	Komponen Kepatuhan			Komponen Hasil			Skor Hasil Evaluasi		
		Bobot	%	Skor	Bobot	%	Skor	Bobot	%	Skor
1	2	3	4	5=3x4	6	7	8=6x7	9=3+6	10=11/9	11=5+8
1	Pengadaan Auditor	10	100,00%	10,00	7	74,07%	5,19	17	89,32%	15,19
2	Pengembangan Kompetensi Auditor	20	78,93%	15,79	13	77,54%	10,08	33	78,39%	25,87
3	Manajemen Kinerja Auditor	20	99,70%	19,94	13	85,58%	11,12	33	94,13%	31,06
4	Manajemen Karier Auditor	10	97,31%	9,73	7	76,43%	5,35	17	88,71%	15,08
	Jumlah	60	92,43%	55,46	40	79,35%	31,74	100	87,20%	87,20

Tabel 9. Skor Indeks Penerapan JFA pada Inspektorat Utama

Hal tersebut menunjukkan bahwa Ittama Setjen DPR RI telah efektif menerapkan JFA dengan mengimplementasikan ketentuan dan mengelola JFA untuk mewujudkan Auditor yang profesional.



Gambar 7. Dokumentasi Pelaksanaan Evaluasi Penerapan JFA dan penyerahan laporan JFA oleh Tim Evaluasi BPKP

Selanjutnya, untuk penjelasan lebih detail atas capaian kinerja organisasi untuk setiap kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut.

SASARAN 1

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI Yang Berkualitas

Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
	1	Indeks Reformasi Birokrasi	A 87,20	BB 78,05*	89,50%

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Sekretariat	2.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB 75,00	B 67,46	89,95%
	3.	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK	5	5	100%
Jenderal DPR RI yang berkualitas	4.	Tingkat Kepatuhan LHKPN	100%	100%	100%
	5.	Tingkat kepatuhan LHKASN	100%	100%	100%

*Realisasi 2022

Tabel 10. Hasil Capaian Kinerja Setjen DPR RI

Indeks Reformasi Birokrasi

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi	BB*	78,05
Target 2023	A 87,20	Tidak tercapai 89,50%
Target Akhir Renstra 2020-2024	AA 90,01	Tidak Memenuhi 86,71%
Rata – Rata K/L/Standar Nasional	BB* 75,65	Lebih tinggi 2,4
Realisasi 2021	77,19	Meningkat 0,86
Realisasi 2022	78,05	tetap

*Realisasi 2022

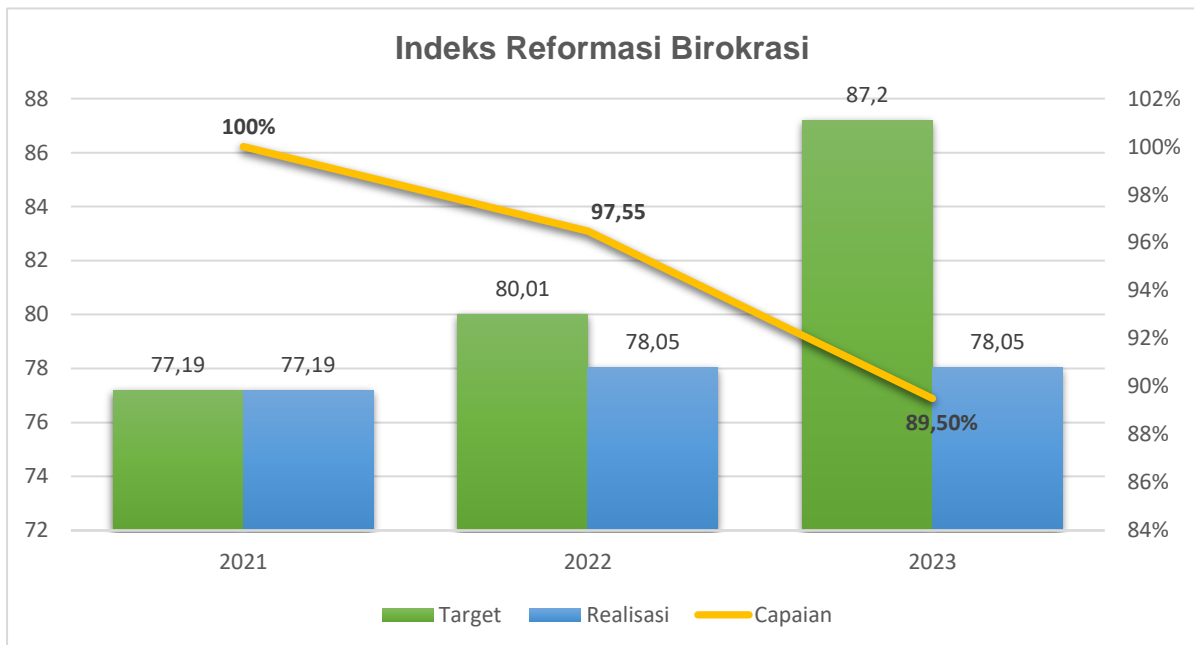
Tabel 11. Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI

Sampai dengan laporan kinerja ini disusun, Kementerian PAN Dan RB belum menerbitkan hasil evaluasi atas Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023, oleh karena itu, untuk realisasi tahun 2023, Ittama menggunakan data indeks nilai RB tahun 2022, berdasarkan Surat KemenPAN RB No. B/710/RB.06/2022 tanggal 6 Desember 2022 hal: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 di Setjen DPR RI adalah skor 78,05 dengan kategori BB. Maka, capaian Nilai Indeks RB tahun 2023 dengan menggunakan nilai realisasi tahun 2022 adalah sebesar **89,50%**.

Berikut adalah Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI Tahun 2022:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2021	2022
A. Komponen Pengungkit			
I. Pemenuhan	20,00	18,32	18,33
II. Hasil antara area perubahan	10,00	5,76	6,80
III.Reform	30,00	21,10	20,64
Total Komponen Pengungkit	60,00	45,18	45,77
B. Komponen Hasil			
1. Akuntabilitas kinerja dan keuangan	10,00	7,54	7,71
2. Kualitas pelayanan publik	10,00	8,57	9,90
3. Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	10,00	8,49	8,27
4. Kinerja Organisasi	10,00	7,41	6,4
Total Komponen Hasil	40,00	32,01	32,28
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit+Hasil)	100,00	77,19	78,05

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 dan 2022, maka terjadi peningkatan yang tidak begitu signifikan termasuk jika dibandingkan dengan target akhir renstra, maka capaian baru sebesar 86,71%, tetapi apabila dibandingkan dengan standar nasional sebesar 75,65 maka nilai indeks RB Setjen DPR RI lebih tinggi 2,4 poin dibandingkan nilai rata-rata Standar Nasional.



Gambar 8. Grafik Target, Realisasi dan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2023

Faktor penyebab belum berhasilnya pencapaian target indeks reformasi birokrasi pada tahun 2023 adalah terdapat perubahan regulasi dalam implementasi reformasi birokrasi, sehingga masih adanya adaptasi dalam perubahan regulasi

dimaksud. Upaya kedepan yang akan dilakukan oleh ittima adalah dengan melaksanakan dan menindaklanjuti hasil evaluasi dari Kemenpan RB.

Kegiatan-kegiatan terkait reformasi birokrasi menggunakan anggaran di Inspektorat I dan II, selanjutnya efisiensi penggunaan sumber daya telah dilakukan melalui penggunaan teknologi informasi berupa Sistem Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi (SiPenjagaRB) yang dibangun oleh Bagian Pengelolaan Kinerja dan Reformasi Birokrasi dengan maksud untuk mempercepat proses pengumpulan dan konfirmasi kelengkapan data. Dengan adanya aplikasi ini maka, Inspektorat utama dapat lebih mudah melakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Seiring dengan waktu, Kementerian PANRB membangun suatu aplikasi berbagi pakai yang digunakan secara nasional yang disebut Portal Reformasi Birokrasi Nasional.

Kegiatan yang telah dilakukan tahun 2023 dalam rangka menunjang pencapaian indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi antara lain:

1. Inspektorat Utama melaksanakan *entry meeting* terkait Evaluasi Reformasi Birokrasi dengan jajaran Biro Perencanaan dan Organisasi.
2. Melaksanakan kegiatan Pendampingan Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Deputi Bidang Administrasi, Deputi Persidangan dan Badan Keahlian Setjen DPR RI.
3. Rapat Koordinasi Pengawasan dengan tema Meningkatkan Tata Kelola dan Nilai Tambah bagi Organisasi melalui Pengawasan Internal Berbasis Risiko di Sekretariat Jenderal DPR RI di Hotel Le Méridien, Jakarta.
4. Melaksanakan kegiatan evaluasi internal perencanaan reformasi birokrasi (*ex ante*) dan pelaksanaan reformasi birokrasi (*on going*) pada proses pembangunan reformasi birokrasi di Setjen DPR RI.

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		
Realisasi Kinerja		B
Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		67,46
Target 2023	BB 75,00	Tidak tercapai 89,95%
Target Akhir Renstra 2020-2024	A 80,01	Belum terpenuhi 84.31%
Rata – Rata K/L/ Standar Nasional	B 67,93*	Lebih rendah 0,47
Realisasi 2021	B 65,31	Meningkat 2,15
Realisasi 2022	B 67,28	Meningkat 0,18

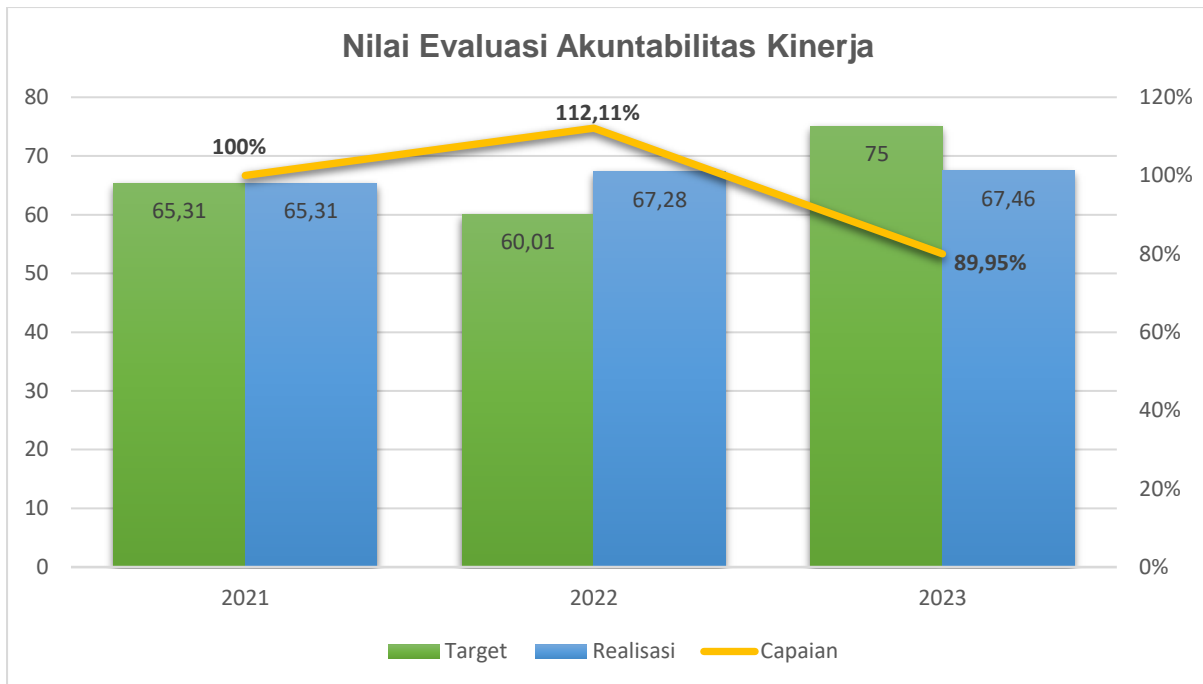
*Realisasi 2022 Tabel 12. Realisasi Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR RI

Berdasarkan surat Menteri PANRB No. B/82/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Tahun 2023 mendapatkan skor 67,46 dengan kategori B. dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut.

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	21,20	21,29
b. Pengukuran Kinerja	30	19,20	19,21
c. Pelaporan Kinerja	15	10,03	10,07
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,85	16,89
Nilai Hasil Evaluasi	100	67,28	67,46
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Tabel 13. Capaian Komponen Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR RI

Nilai di atas menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik” yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada level Lembaga dan sebagian unit kerja, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022, namun masih dalam kategori yang sama. Jika disandingkan dengan target akhir renstra, maka nilai capaian masih sebesar 84,31% dari target akhir yang ditetapkan. Namun apabila dibandingkan dengan rata – rata standar nasional sebesar 67,93 maka nilai Setjen DPR RI lebih rendah 0,47 poin dibawah rata-rata standar nasional .



Gambar 9. Grafik Target, Realisasi dan Capaian
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021-2023

Pencapaian nilai evaluasi akuntabilitas kinerja yang kurang dari target pada tahun 2023 ini, dipengaruhi oleh hasil dari rekomendasi Inspektorat maupun KemenPAN RB atas evaluasi akuntabilitas kinerja, yang tidak dilakukan pendalaman sehingga hanya sekedar pemenuhan dokumen saja, tidak sampai pada implementasi secara nyata. Oleh karena itu, Ittama kedepannya berkomitmen untuk berupaya maksimal meningkatkan nilai tersebut dengan cara setiap tahun melakukan evaluasi secara mandiri oleh tim penilai internal yang merupakan amanah dari permenpan RB No, 88 tahun 2021 sebelum tim eksternal dari kemenPAN RB, selanjutnya Inspektorat Utama akan melakukan pemantauan dan mendorong untuk menindaklanjuti terhadap rekomendasi hasil penilaian internal dan eksternal.

Dalam upaya peningkatan capaian akuntabilitas kinerja Setjen DPR RI, telah dilakukan efisiensi dalam tahapan pelaksanaan kegiatan yaitu penggunaan teknologi informasi dalam pengumpulan data untuk mengukur kinerja baik unit kerja maupun individu, sehingga lebih efektif, efisien dan *paperless*.

Kegiatan-kegiatan terkait evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menggunakan anggaran Inspektorat I dan II, adapun kegiatan yang telah dilakukan tahun 2023 dalam rangka menunjang pencapaian indikator kinerja atas nilai evaluasi akuntabilitas kinerja antara lain:

1. Menyusun pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Setjen DPR RI melalui Keputusan Setjen DPR RI Nomor 2643/SEKJEN/2022 yang telah disesuaikan dengan PerMenPAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Melaksanakan Evaluasi atas Implementasi SAKIP Internal baik tingkat Setjen, eselon II maupun eselon III, yang ditujukan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Sekretariat Jenderal DPR RI.
3. Melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi sakip internal.
4. *Knowledge Sharing* terkait Dukungan Teknis Administrasi terhadap Implementasi e-Audit ke Inspektorat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan terhadap Implementasi e-SAKIP di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
5. Pelatihan Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan APIP yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP.
6. Pemberian Penghargaan Atas Implementasi SAKIP Terbaik Tahun 2023 Tingkat Unit Kerja (Eselon II) di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yaitu Biro Umum sebagai pemenang pertama, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur sebagai pemenang kedua, dan yang ketiga kepada Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat.



Gambar 10. Dokumentasi Penghargaan Atas Implementasi SAKIP Terbaik Tahun 2023

Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Predikat WBK

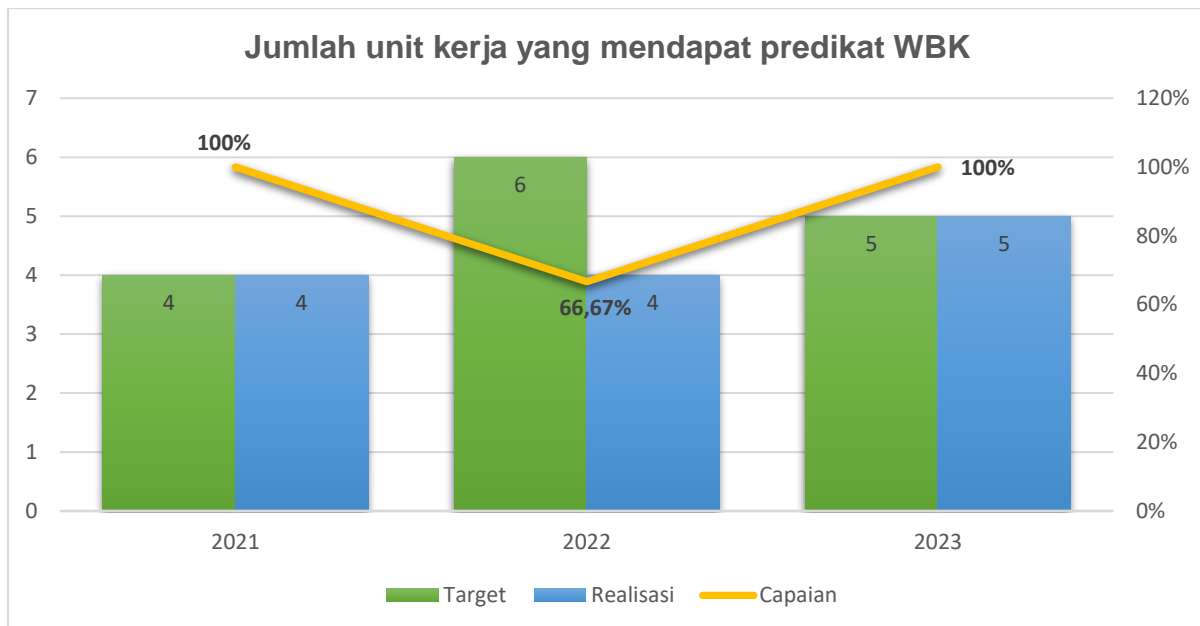
Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Jumlah Unit Kerja yang Mendapat Predikat WBK		5 Unit Kerja
Target 2023	5 unit kerja	Tercapai 100%
Target Akhir Renstra 2020-2024	18 unit kerja	Belum terpenuhi 27,77%
Rata – Rata K/L/ Standar Nasional	-	-
Realisasi 2021	4 unit kerja	Meningkat 1 unit kerja
Realisasi 2022	4 unit kerja	Meningkat 1 unit kerja

*Realisasi 2022 Tabel 14. Realisasi Jumlah Unit Kerja yang Mendapat Predikat WBK

Berdasarkan surat Menteri PANRB No. B/311/RB.99/2023 tanggal 28 November 2023 hal Undangan Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2023, penerima penganugerahan Zona Integritas menuju WBK adalah Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, sehingga secara keseluruhan pada tahun ini, unit kerja yang mendapatkan predikat zona integritas menuju WBK menjadi 5 unit kerja sehingga capaian kinerja tahun 2023 terpenuhi 100%. Jika mengacu pada standar nasional atas pencapaian Zona Integritas, untuk indikator tersebut belum terdapat rata – rata standar nasionalnya namun jika secara kumulatif, unit kerja yang telah mendapatkan predikat WBK/WBBM disektor strategis pada tahun 2022 sebanyak 835 unit (kumulatif) dari 850 unit yang ditargetkan oleh KemenPAN RB.

Unit kerja yang mendapatkan predikat WBK dari KemenPAN RB di Setjen DPR RI adalah Biro Kerja Sama antar Parlemen dan Organisasi Internasional, Pusat Pendidikan dan Pelatihan (sekarang: Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif), Biro Persidangan II, Pusat Kajian Anggaran (sekarang: Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara) dan yang terakhir pada tahun 2023 adalah Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat. Jumlah unit kerja yang memperoleh predikat WBK saat ini, apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dan 2022, meningkat dengan menambah 1 (satu) unit kerja yang meraih predikat WBK, namun apabila dibandingkan dengan dengan target akhir renstra, maka nilai capaian masih

sebesar 27,77% dari target akhir yang ditetapkan atau sebanyak 13 unit kerja lagi yang harus mempunyai predikat WBK.



Gambar 11. Grafik Target, Realisasi dan Capaian
Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK tahun 2021-2023

Pencapaian target ini, tidak lepas dari komitmen Ittama untuk berupaya maksimal meningkatkan jumlah unit kerja tersebut melalui pendampingan dan melakukan pemantauan terhadap unit kerja untuk menindaklanjuti rekomendasi dari KemenPAN RB. Meskipun saat ini, baik Ittama maupun unit kerja yang ditunjuk, masih dalam proses adaptasi terhadap aturan baru mengenai pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah yaitu Permenpan Nomor 90 Tahun 2021 dalam hal pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan penambahan indikator di dalamnya.

Dalam upaya peningkatan capaian Jumlah Unit Kerja yang Mendapat Predikat WBK akuntabilitas kinerja Setjen DPR RI, telah dilakukan efisiensi dalam tahapan pelaksanaan kegiatan yaitu penggunaan teknologi informasi dalam pengumpulan data, sehingga lebih efektif, efisien dan *paperless*.

Upaya yang akan dilakukan kedepannya adalah menetapkan indikator kinerja zona integritas ke dalam perjanjian kinerja unit kerja yang sudah ditetapkan/diajukan menuju WBK. Hal ini dimaksudkan agar unit kerja yang ditetapkan menuju predikat WBK dapat proaktif dan meningkatkan komitmen lebih di dalam rangka pencapaian menuju unit kerja predikat WBK/WBBM.

Kegiatan-kegiatan dalam rangka upaya pencapaian Jumlah Unit Kerja untuk Mendapatkan predikat WBK menggunakan anggaran Inspektorat I dan II serta unit kerja terkait, adapun kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2023 dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja “Jumlah Unit Kerja untuk Mendapatkan predikat WBK” antara lain:

1. Menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka persiapan pengusulan unit kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Tahun 2023
2. Rapat koordinasi dalam rangka sosialisasi dan pengusulan unit kerja pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2023.
3. Reviu dan Pendampingan Pengisian LKE atas Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.
4. *Knowledge Sharing* terkait pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ke Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau.
5. Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI hadir secara *virtual entry meeting* Evaluasi SAKIP, RB, dan ZI Tahun 2023.



Gambar 12. Dokumentasi Rapat Koordinasi Tim TPI Pembangunan ZI

Tingkat Kepatuhan LHKPN

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan LHKPN		100%
Target 2023	100%	Tercapai 100%
Target Akhir Renstra 2020 -2024	-	-
Rata – Rata K/L/ Standar Nasional	100%*	Tercapai 100%
Realisasi 2021	100%	Mempertahankan
Realisasi 2022	100%	Mempertahankan

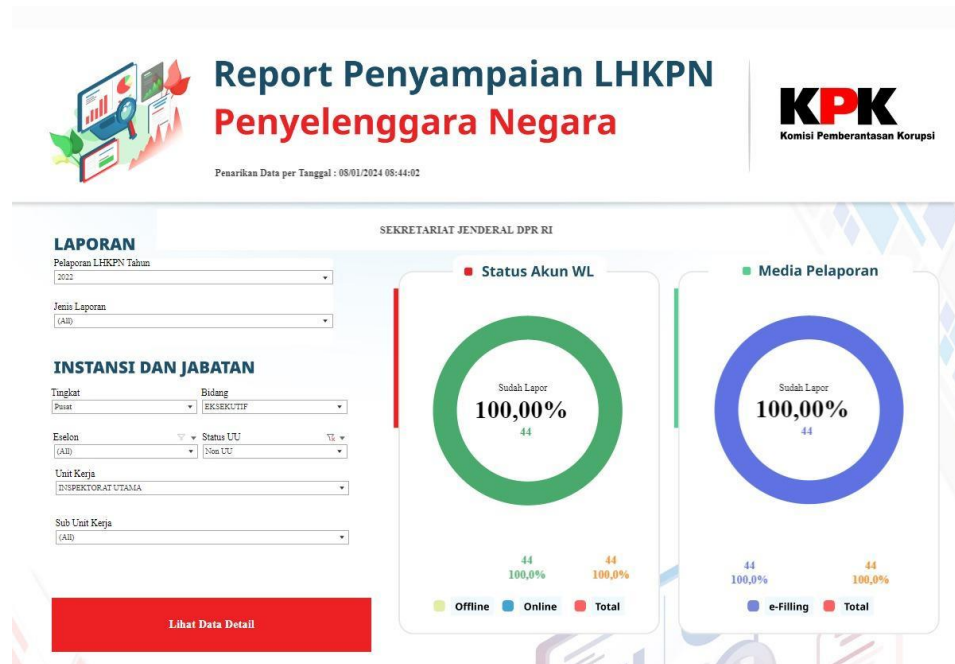
*Realisasi 2022

Tabel 15. Realisasi Tingkat Kepatuhan LHKPN

Tingkat kepatuhan LHKPN pada tahun 2023, telah terealisasi 100% sesuai target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023, begitu pula tahun 2021 dan 2022, semua terealisasi sebesar 100%. Namun capaian tingkat kepatuhan LHKPN tidak dapat dibandingkan dengan target akhir renstra ittama, karena tingkat kepatuhan LHKPN tidak dimasukkan ke dalam indikator kinerja kegiatan pada Renstra ITTAMA 2020 – 2024. Namun apabila dibandingkan dengan capaian di Inspektorat BPKP pada tahun 2022, maka antara Inspektorat Utama Setjen DPR RI dengan Inspektorat BPKP sama-sama meraih capaian 100%.



Gambar 13. Grafik Target dan Realisasi Tingkat Kepatuhan LHKPN Setjen DPR RI



Gambar 14. Monitoring Pelaporan LHKPN di aplikasi E-LHKPN

Berikut adalah jumlah Wajib Lapo LHKPN Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun Pelaporan 2023:

Unit	Wajib Lapo	Sudah Lapo	Tepat Waktu	%
Sekretaris Jenderal	1	1	1	100%
Deputi Bidang Administrasi	28	28	28	100%
Deputi Bidang Persidangan	18	18	18	100%
Inspektorat Utama	43	43	43	100%
Badan Keahlian	12	12	12	100%
Pusat Pendidikan dan Pelatihan	3	3	3	100%
Pusat Teknologi Informasi	2	2	2	100%
Total	103	103	103	100%

Gambar 15. Jumlah Wajib Lapo LHKPN Setjen DPR RI Tahun 2023

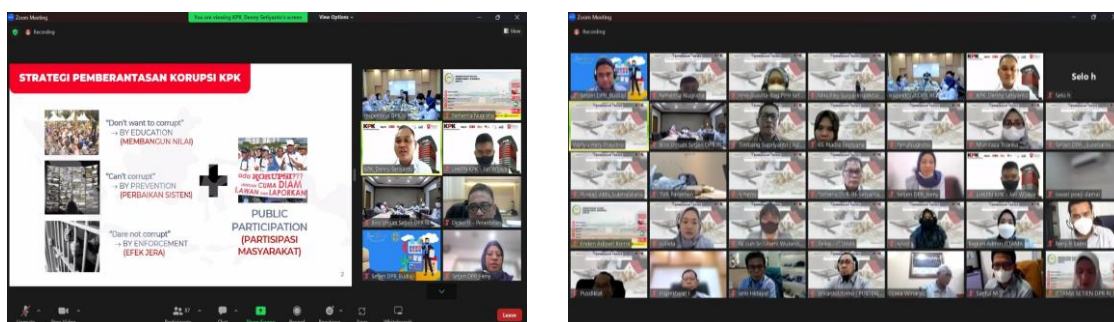
Faktor Keberhasilan dari tercapainya tingkat kepatuhan LHKPN sesuai target yang ditetapkan dari tahun ke tahun adalah konsistensi Ittama untuk membentuk tim pemantauan dan pendampingan dalam pengisian LHKPN. Selain itu, setiap awal tahun, Ittama selalu melakukan sosialisasi pengisian LHKPN dengan narasumber langsung dari KPK, hal ini untuk memastikan semua pegawai dapat mengisi LHKPN dengan benar dan tepat. Kedepan, Inspektorat Utama akan terus menjaga hubungan baik dengan KPK dan selalu berkoordinasi secara rutin guna mempertahankan capaian tersebut.

Kegiatan-kegiatan dalam rangka upaya pencapaian “Tingkat kepatuhan LHKPN” menggunakan anggaran Inspektorat Utama sebesar Rp51.110.000,00 yang terealisasi 100% dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%. Anggaran ini

digunakan untuk kegiatan sosialisasi kepada seluruh pegawai yang wajib LHKPN menggunakan media zoom, kegiatan dilakukan sekaligus dan dilaksanakan didalam kantor dalam rangka efisiensi anggaran.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2023 dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut, antara lain:

- Sosialisasi pengisian LHKPN.
- Pemantauan dan pendampingan LHKPN. Pendampingan berupa bantuan penyelesaian laporan Wajib Laporan sampai dengan proses kirim selesai dan berstatus “Sudah Diperbaiki”.
- Koordinasi yang dilakukan secara efektif dengan KPK dan seluruh unit di Setjen DPR RI.



Gambar 16. Dokumentasi Sosialisasi Pengisian LHKPN di Setjen DPR RI

Tingkat Kepatuhan LHKASN		
Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan LHKASN		100%
Target	100%	Tercapai 100%
Target Akhir Renstra 2020-2024	-	-
Rata - Rata K/L/Standar Nasional	100%*	Tercapai 100%
Realisasi 2021	100%	Mempertahankan
Realisasi 2022	100%	Mempertahankan

*Realisasi 2022 Tabel 15. Realisasi Tingkat Kepatuhan LHKASN

Berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 2 Tahun 2023 tentang penyampaian LHKAN bagi seluruh Aparatur Negara kecuali pejabat yang masuk kategori wajib LHKAN. Surat edaran ini mengganti surat edaran terdahulu yang

diterbitkan oleh Menteri PANRB di Tahun 2015 yaitu Surat edaran Nomor 1 Tahun 2015 tentang kewajiban penyampaian LHKASN di lingkungan Instansi Pemerintah. Perubahan nomenklatur sejak tahun 2023 dikarenakan memperluas cakupan wajib lapor kekayaan yang dahulu hanya khusus untuk pegawai negeri sipil, di surat edaran baru disebutkan selain pegawai negeri sipil terdapat pula anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang wajib melaporkan harta kekayaannya melalui penyampaian surat pemberitahuan (SPT) Tahunan yang didalamnya memuat laporan harta kekayaan.

Pada Laporan Kinerja ini, Ittama masih menggunakan nomenklatur lama pada indikator kinerja “Tingkat Kepatuhan LHKASN” yang seharusnya diubah menjadi Tingkat Kepatuhan LHKAN, hal ini disebabkan karena pada Pejanjian Kinerja 2023 masih menggunakan nomenklatur lama, kedepannya indikator dimaksud akan disesuaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Untuk Tingkat kepatuhan LHKASN pada tahun 2023, nilai capaian telah terealisasi sebesar 100% sesuai target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2023, begitu pula tahun 2021 dan 2022, semua terealisasi 100%. Namun, capaian ini, tidak dapat dibandingkan dengan target akhir renstra ittama, karena tingkat kepatuhan LHKASN tidak dimasukkan ke dalam indikator kinerja kegiatan pada Renstra ITTAMA 2020 – 2024. Namun apabila dibandingkan dengan Inspektorat BPKP, maka capaian yang diraih oleh Ittama Setjen DPR dengan Inspektorat BPKP sama-sama tercapai 100%.



Gambar 16. Grafik Target dan Realisasi Tingkat Kepatuhan LHKASN Setjen DPR RI

Faktor Keberhasilan dari tercapainya tingkat kepatuhan LHKASN sesuai target yang ditetapkan dari tahun ke tahun adalah konsistensi Ittama untuk membentuk tim pemantauan dan pendampingan dalam pengisian eSPT. Selain itu, setiap awal tahun, Ittama selalu melakukan sosialisasi dan menyampaikan surat edaran ke unit kerja untuk mengingatkan untuk melakukan pengisian eSPT di jajarannya dengan menyerahkan bukti penyampaian eSPT ke Ittama serta berkoordinasi dengan Biro Keuangan terkait sosialisasi/*coaching clinic* pengisian eSPT.

Kegiatan-kegiatan dalam rangka upaya pencapaian “Tingkat kepatuhan LHKASN” menggunakan anggaran seefisien mungkin dengan cara bekerja sama dengan Biro Keuangan dan Ditjen Pajak Tanah Abang III dalam menyediakan sarana *coaching clinic* pengisian eSPT di Setjen DPR RI. adapun kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2023, antara lain: melakukan pemantauan dan pendampingan dalam pengisian eSPT sebagai pengganti dari pengisian SIHARKA.



Gambar 17. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi dan *coaching clinic* pengisian eSPT

SASARAN 2

Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	1 Skor Maturitas SPIP	Level 3 3,22	Level 3 3,270	101,55%

*Realisasi 2022

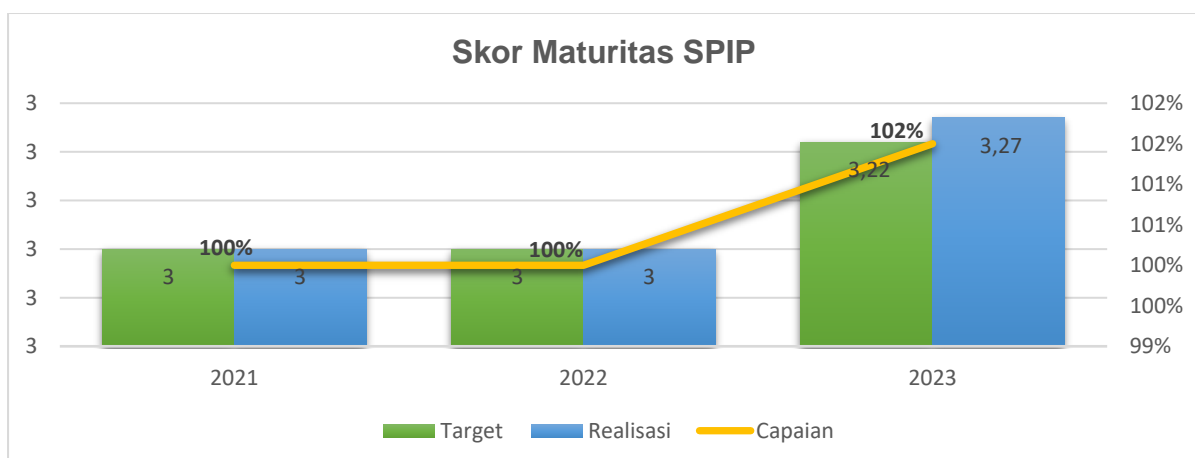
Tabel 16. Hasil Capaian Skor Maturitas SPIP Setjen DPR RI

Skor Maturitas SPIP

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Skor Maturitas SPIP		Level 3 3,270
Target 2023	Level 3 3,22	Tercapai 101,55%
Target Akhir Renstra 2020-2024	-	-
Rata – Rata K/L/Standar Nasional	Level 3*	100%
Realisasi 2021	Level 3	Mempertahankan
Realisasi 2022	Level 3	Mempertahankan

*Realisasi 2022 Tabel 17. Realisasi Skor Maturitas SPIP Setjen DPR RI

Berdasarkan surat BPKP Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan No. PE.09.03/SP-279/D2/02/2023 tanggal 29 Desember 2023 hal Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi pada Sekjen DPR RI Tahun 2023, skor maturitas SPIP Tahun 2023 mendapatkan skor 3,270 dengan kategori pada level 3, dari hasil tersebut maka pada tahun 2023, skor maturitas SPIP telah tercapai 101,55% melebihi target yang ditetapkan. Apabila nilai tersebut, dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022, maka skor saat ini lebih tinggi dibanding 2 (dua) tahun sebelumnya namun masih dalam kategori yang sama. Untuk level 3 pada SPIP dapat diartikan bahwa organisasi telah mampu mendefinisikan kerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendaliannya telah dilaksanakan namun belum efektif.



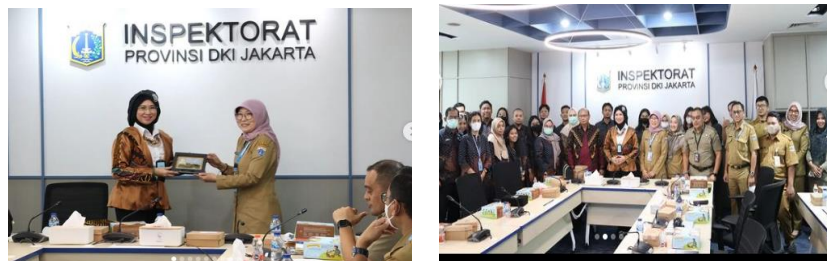
Gambar 18. Grafik Target, Realisasi dan Capaian
Skor Maturitas SPIP Tahun 2021-2023

Skor Maturitas SPIP tahun 2023, tidak bisa dibandingkan dengan target akhir renstra ittama, karena indikator tersebut tidak dimasukkan sebagai indikator kegiatan pada renstra ittama 2020 -2024, namun apabila dibandingkan dengan skor maturitas SPIP Lembaga Negara sejenis yaitu Inspektorat Setjen MPR, maka capaian yang diraih, berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2022 Setjen MPR berada di level 3, yang artinya capaian tersebut berada di kategori yang sama dengan Ittama.

Capaian 101,55 % pada tahun ini, tidak lepas dari upaya keras ittama dalam menindaklanjuti rekomendasi tim evaluasi dari BPKP yaitu dengan memenuhi *area of improvement* implementasi SPIP di tingkat eselon 1 dan Sekjen. Kedepannya ittama akan terus berkomitmen melakukan perbaikan berdasarkan saran yang diberikan oleh BPKP kepada Setjen DPR RI maupun Ittama Setjen DPR RI. Perbaikan ini, sebagai upaya peningkatan skor maturitas SPIP di Tahun 2024.

Kegiatan-kegiatan dalam rangka upaya pencapaian “Skor Maturitas SPIP” menggunakan anggaran di Inspektorat Utama maupun anggaran Inspektorat I dan II seefisien mungkin dengan menggabungkan beberapa kegiatan dalam 1 (satu) kegiatan secara bersamaan, adapun kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2023, antara lain:

1. *Benchmarking* Maturitas SPIP dan SPI KPK terkait Pencegahan Korupsi Sekretariat Jenderal ke Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.
2. Evaluasi Hasil Penjaminan Kualitas Atas Penilaian Maturitas SPIP Tahun 2022
3. Pelatihan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kementerian/Lembaga yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP.
4. *Benchmarking* Peningkatan Kapabilitas APIP atau IACM dan Maturitas SPIP ke Lombok Tengah, Lombok Barat, Provinsi NTB.
5. Pendampingan Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2023.



Gambar 19. Dokumentasi *Benchmarking* Maturitas SPIP dan SPI KPK ke Inspektorat Prov DKI Jakarta

SASARAN III

Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	1.	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK	89%	90,61%	101,81%
		2.	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP	67%	82,5%	123,13%

*Realisasi 2022

Tabel 18. Hasil Capaian Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan BPK dan APIP Setjen DPR RI

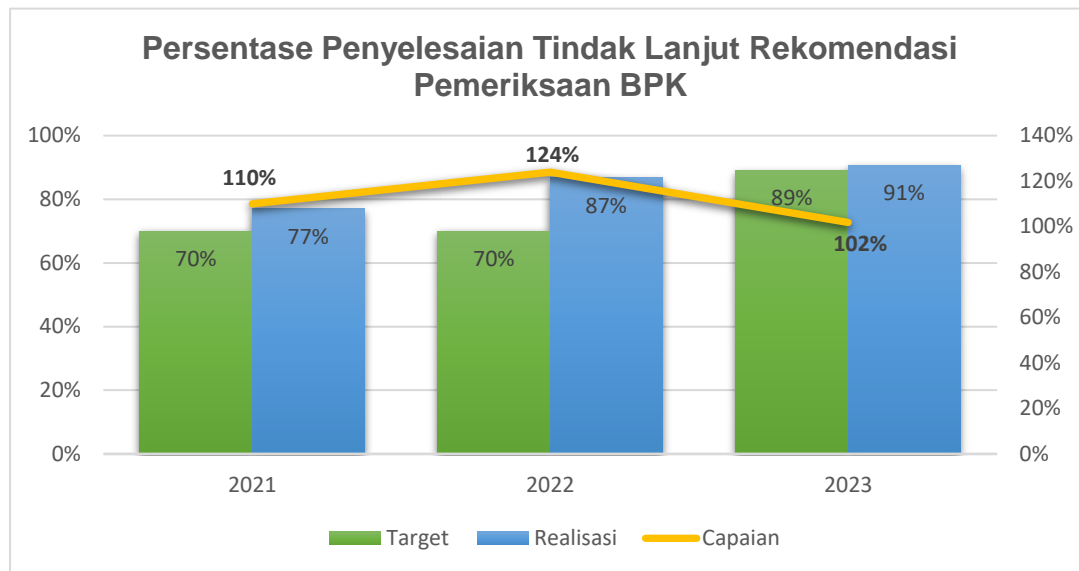
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan BPK

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan BPK		90,61%
Target 2023	89%	Tercapai 101,81%
Target Akhir Renstra 2020-2024	95%	Belum terpenuhi 90%
Rata – Rata K/L/ Standar Nasional	83,90%	Melebihi standar nasional 6,71
Realisasi 2021	77%	Meningkat 13,61
Realisasi 2022	86,75%	Meningkat 3,86

*Realisasi 2022

Tabel 19. Realisasi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan BPK di Setjen DPR RI

Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI semester I 2023, bahwa persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK Tahun 2023 sebesar 90,61%, sehingga target 2023 tercapai 101,81% melebihi target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu Tahun 2021 dan 2022, terdapat kenaikan yang signifikan yang terjadi di Tahun 2023.



Gambar 20. Grafik Target, Realisasi dan Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan BPK Tahun 2021-2023

Keberhasilan Ittama meraih capaian yang tinggi pada Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI disebabkan adanya faktor sebagai berikut:

- a. Mendorong unit kerja untuk melakukan penyelesaian temuan BPK dalam waktu 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK diterbitkan.
- b. Pemantauan tindak lanjut secara efektif terhadap auditi.
- c. Koordinasi dan konsultasi dengan BPK RI dalam proses penyelesaian rekomendasi BPK termasuk pemenuhan eviden tindak lanjut, terutama untuk temuan diatas 10 tahun.
- d. Komunikasi intensif dengan pihak-pihak yang terlibat di dalam temuan dan rekomendasi.

Keberhasilan pencapaian target tahun ini perlu ditingkatkan karena jika dibandingkan dengan target akhir pada renstra, maka capaian ini baru terpenuhi sebesar 90%, oleh karena itu perlu adanya upaya maksimal dari ittama yang didukung

oleh unit kerja yang masih memiliki temuan dimaksud. namun apabila dibandingkan dengan standar nasional yang diumumkan oleh Ketua BPK RI pada kegiatan *entry meeting* dengan pimpinan kementerian/Lembaga di lingkungan Auditoriat Keuangan Negara (AKN) III pada tanggal 5 Januari 2024 di kantor pusat BPK, dinyatakan bahwa hingga semester 1 tahun 2023 menunjukkan rata-rata penyelesaian sebesar 83,90% yang artinya rata – rata standar nasional berada dibawah dari capaian yang diraih oleh Ittama Setjen DPR RI.

Adapun, Kegiatan-kegiatan dalam rangka upaya pencapaian “Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI” menggunakan anggaran Inspektorat Utama sebesar Rp245,200,000 yang terserap 100% dengan capaian realisasi indikator kinerja melebihi target yaitu mencapai 101,81%. Anggaran ini digunakan seefisien mungkin dalam penyelesaian tindak lanjut ini. Saat ini, Ittama berkolaborasi dengan Biro Keuangan mengembangkan teknologi informasi guna memudahkan pengumpulan eviden dari unit kerja serta kemudahan akses oleh unit kerja untuk memantau rekomendasi yang belum selesai. Selama ini Ittama menggunakan *link gdrive* dalam proses pengumpulan eviden untuk mengurangi penggunaan kertas yang berlebihan. Berikut kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2023 untuk mendukung keberhasilan pencapaian target, antara lain:

1. Melakukan pendampingan kepada auditi sejak pengisian jawaban konsep temuan BPK sampai dengan pemenuhan eviden tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.
2. Menyelenggarakan rapat pembahasan *progress report* tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI.
3. Cek fisik dengan tujuan perusahaan yang belum selesai mengembalikan kerugian negara.
4. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP minimal dua kali setahun sesuai PKPT berbasis risiko.



Gambar 20. Dokumentasi Kegiatan penyelesaian TLHP BPK RI

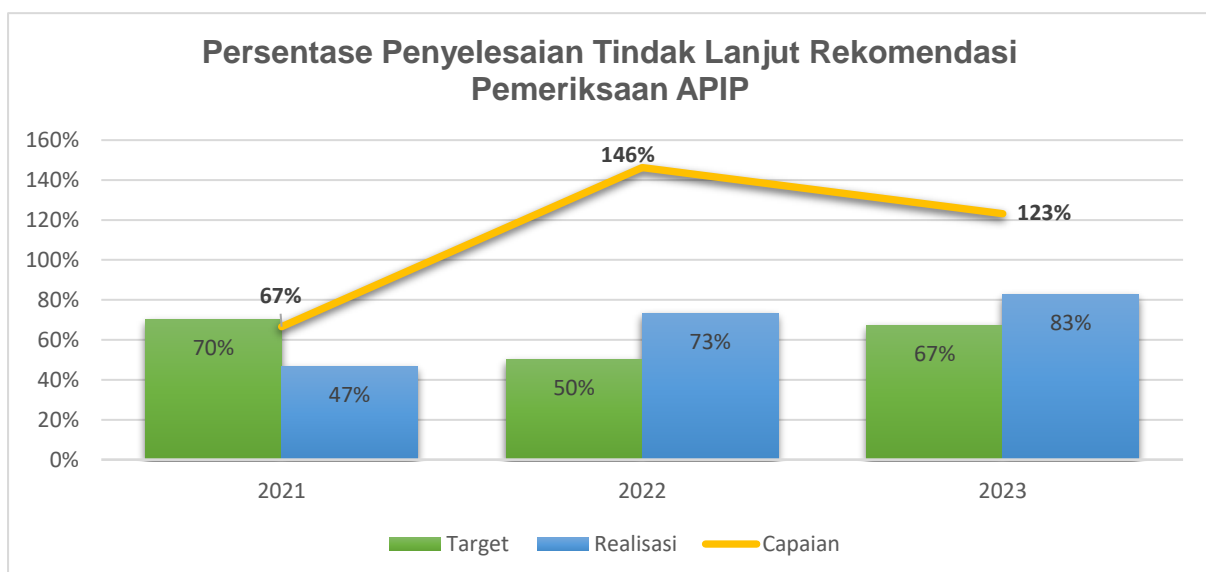
Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Rekomendasi Pemeriksaan APIP

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan APIP		82,5%
Target 2023	67%	Tercapai 123,13%
Target Akhir Renstra 2020-2024	100%	Belum terpenuhi 82,5%
Rata – Rata K/L/ Standar Nasional	95,71%*	Tidak terpenuhi 13,21
Realisasi 2021	46,59%	Meningkat 39,91
Realisasi 2022	73,13%	Meningkat 9,37

*Realisasi 2022

Tabel 20. Realisasi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan APIP di Setjen DPR RI

Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP semester II 2023, bahwa persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP Tahun 2023 sebesar 82,5%, sehingga target 2023 tercapai 123,13% melebihi target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu Tahun 2021 dan 2022, terdapat kenaikan yang signifikan yang terjadi di Tahun 2023. Hal ini pula dipengaruhi oleh rendahnya target yang ditetapkan, seharusnya target yang ditetapkan berdasarkan dengan capaian tahun sebelumnya.



Gambar 21. Grafik Target, Realisasi dan Capaian

Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan APIP Tahun 2021-2023

Adapun faktor keberhasilan Ittama meraih capaian 123,13% pada Tahun 2023 atas Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP disebabkan adanya faktor Pemantauan terhadap hasil pengawasan APIP terhadap temuan Inspektorat II berjalan efektif, sehingga persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP meningkat. Upaya yang dilakukan guna meningkatkan capaian indikator kinerja tersebut antara lain:

- a. Pemantauan tindak lanjut secara rutin terhadap auditi menggunakan teknologi informasi.
- b. Melakukan perbaikan pada pelaporan pengawasan dan rekomendasi hasil pengawasan dengan cara peningkatan kompetensi auditor.
- c. Mendorong unit kerja melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah Laporan Hasil Pengawasan terbit.

Namun, upaya tersebut perlu ditingkatkan lagi melalui terobosan-terobosan yang efektif agar target akhir renstra tercapai 100% dimana saat ini baru tercapai 82,5% termasuk rata – rata kementerian atau lembaga, tingkat penyelesaian di Ittama masih rendah dibandingkan capaian realisasi di Inspektorat Utama BPOM sebesar 95,71%. Kegiatan-kegiatan dalam rangka upaya pencapaian “Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP” menggunakan anggaran Inspektorat Utama maupun Inspektorat I dan II seefektif dan seefisien mungkin, dengan melakukan penggabungan kegiatan pemantauan tindak lanjut BPK dan APIP secara bersamaan dan menggunakan *link gdrive* dalam penggumpulan eviden guna mengurangi penggunaan kertas.

Adapun, kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2023 adalah melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) secara berkala dan melakukan pendampingan kepada auditi dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan APIP.

SASARAN 4

Meningkatnya Kualitas Dan Kapabilitas Organisasi Inspektorat Utama

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas dan kapabilitas organisasi Inspektorat Utama	1.	Nilai Evaluasi AKIP di Lingkup Inspektorat Utama	BB 75	BB 72,15	96,2%
		2.	Tingkat penilaian kapabilitas APIP	Level 3 3,1	Level 3 3,045	98,22%

*Realisasi 2022 Tabel 21. Hasil Capaian Nilai Evaluasi AKIP dan Kapabilitas APIP Inspektorat Utama

Nilai Evaluasi AKIP di Lingkup Inspektorat Utama

Realisasi Kinerja		BB
Indikator Kinerja Nilai Evaluasi AKIP di Lingkup Inspektorat Utama		72,15
Target 2023	BB 75,00	Tidak tercapai 96,20%
Target Akhir Renstra 2020-2024	-	-
Rata – Rata K/L/Standar Nasional	B 67,93	Terpenuhi 4,22
Realisasi 2021	B	Meningkat
Realisasi 2022	B 67,00	Meningkat 5,15

* Realisasi 2022 Tabel 22. Realisasi Nilai Evaluasi AKIP Inspektorat Utama

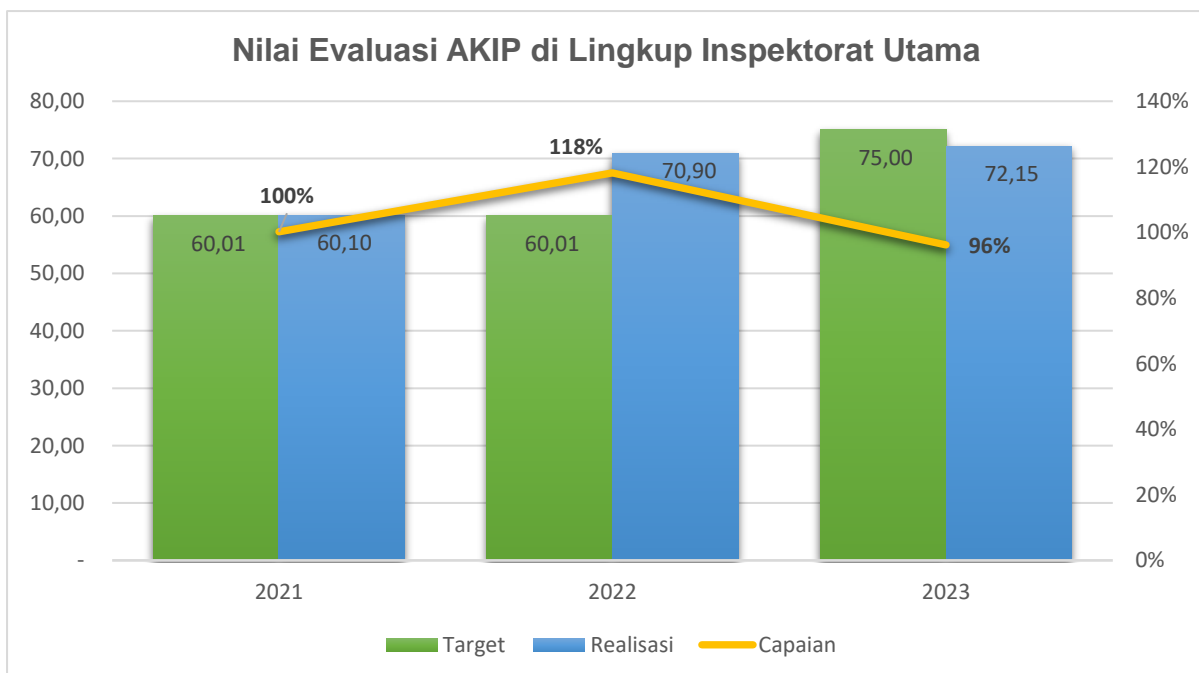
Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Internal Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 Inspektorat Utama Setjen DPR RI, bahwa nilai evaluasi AKIP di lingkup Inspektorat Utama adalah sebesar 72,15 dengan predikat BB. Nilai ini belum memenuhi target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja Tahun 2023 namun untuk kategorinya sendiri yaitu BB atau sangat baik, telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Berikut adalah rincian hasil evaluasi AKIP di Lingkup Ittama:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	22,80	22,80
b. Pengukuran Kinerja	30	20,10	20,70
c. Pelaporan Kinerja	15	9,6	11,40
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,50	17,25
Nilai Hasil Evaluasi	100	67,00	72,15
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	BB

* Realisasi 2022

Tabel 23. Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Utama Tahun 2023

Nilai di atas menunjukkan bahwa terjadi kenaikan skor dan kategori dari tahun 2022, namun nilai tersebut tidak memenuhi target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Tetapi, apabila dibandingkan dengan realisasi capaian rata-rata standar nasional yaitu sebesar 67,93 dengan kategori B di tahun 2022, maka nilai AKIP Utama lebih tinggi 4,22 poin dari rata-rata standar nasional. Meskipun, apabila dibandingkan dengan 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan 2022, nilai AKIP tahun 2023 tidak mencapai target yang ditetapkan, namun telah terjadi kenaikan nilai yang signifikan yaitu sebesar 5,15 poin dari tahun sebelumnya. Dan untuk target akhir renstra, indikator ini tidak dimasukkan pada indikator kinerja di Renstra Utama 2020-2024, sehingga perkembangan kemajuan pencapaiannya tidak dapat diukur.



Gambar 22. Grafik Target, Realisasi dan Capaian Nilai Evaluasi AKIP di Lingkup Inspektorat Utama

Faktor yang berpengaruh terhadap tidak tercapainya nilai yang ditetapkan, disebabkan belum terdapat keselarasan indikator kinerja mengenai realisasi anggaran pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama, Inspektorat I dan II dengan Renstra Ittama, selain itu terdapat indikator yang sifatnya tidak realistis pada target unit kerja yang memperoleh predikat WBK, belum dilakukannya reuiu rencana aksi dan belum menyelaraskan indikator pada Perjanjian Kinerja dan Renstra. Oleh karena itu, kedepannya Inspektorat Utama akan berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil evaluasi yang disarankan oleh tim evaluasi internal, yaitu: mengevaluasi target indikator unit yang memperoleh predikat WBK agar lebih *realistic* dan *achievable*, menyusun dokumen *crosscutting* yang dapat memberikan informasi tentang seluruh hubungan kinerja antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan, serta melakukan kegiatan reuiu renstra dan rencana aksi.

Adapun, Kegiatan-kegiatan dalam rangka upaya pencapaian “Nilai Evaluasi AKIP di Lingkup Inspektorat Utama” menggunakan anggaran Inspektorat Utama maupun anggaran Inspektorat II seefektif dan efisien mungkin dengan menggunakan teknologi informasi dalam proses pengumpulan data sehingga mengurangi penggunaan kertas.

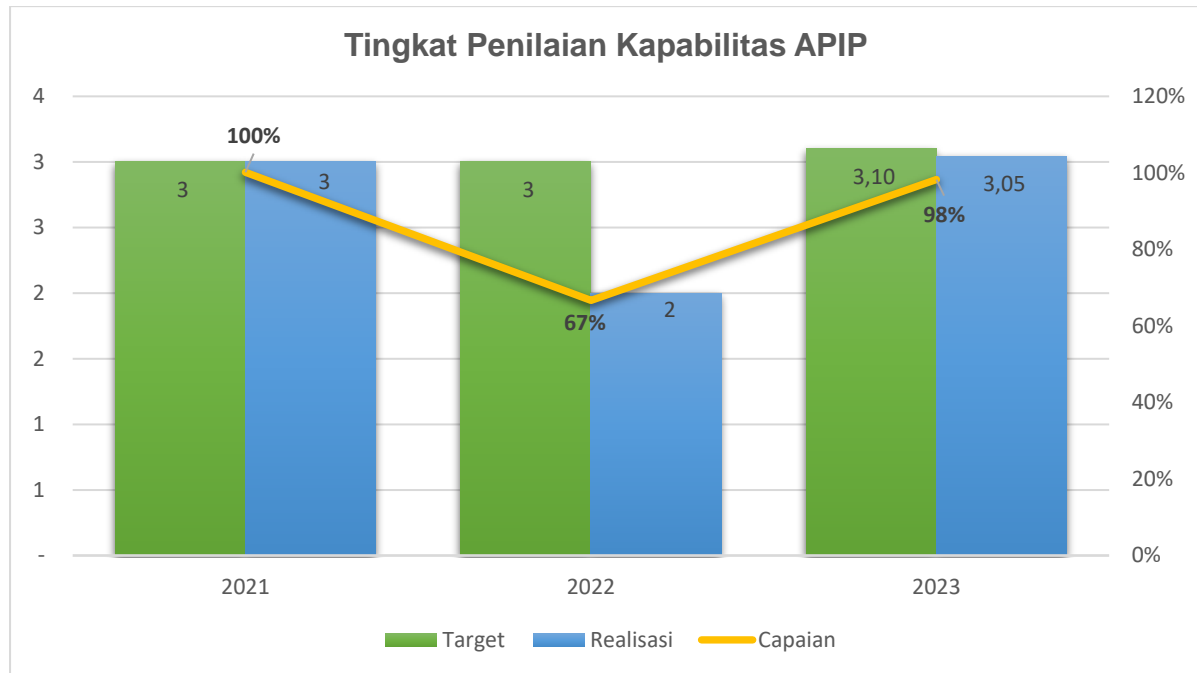
Adapun kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2023, antara lain membuat renaksi AKIP serta melakukan penelaahan atas kesesuaian dengan Renstra Setjen Tahun 2020 - 2024 (Revisi ke-2).

Tingkat Penilaian Kapabilitas APIP		
Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Tingkat Penilaian Kapabilitas APIP		Level 3 3,045
Target 2023	Level 3 3,1	98,23%
Target Akhir Renstra 2020-2024	Level 4	76.13%
Rata – Rata K/L/Standar Nasional	Level 2*	Memenuhi
Realisasi 2021	Level 3	Meningkat
Realisasi 2022	Level 2	Meningkat

*Realisasi 2022

Tabel 24. Realisasi Tingkat Penilaian Kapabilitas APIP

Berdasarkan Laporan BPKP No. PE.09.03/LHP-220/D202/2/2023 tanggal 6 Desember 2023 atas Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Setjen DPR RI Tahun 2023, disimpulkan bahwa Kapabilitas APIP Setjen DPR RI berada pada level 3 dengan skor 3,045 yang artinya *integrated* yaitu Praktik profesional dan manajemen audit intern diterapkan secara seragam.



Gambar 23. Grafik Target, Realisasi dan Capaian Tingkat Penilaian Kapabilitas APIP

Skor yang dicapai di tahun 2023 ini, belum memenuhi target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja Tahun 2023 yaitu sebesar 98,23% namun untuk kategorinya sendiri yaitu level 3 telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan 2022, pada tahun 2023 telah terjadi kenaikan yaitu dari level 2 di tahun 2022 menjadi level 3 di tahun 2023, begitu pula jika membandingkan dengan rata-rata capaian lembaga sejenis yaitu Inspektorat Setjen MPR RI, dimana nilainya sama dengan Ittama di tahun 2022, dan untuk target akhir renstra, perkembangan pencapaian sebesar 76,13%. Oleh karena itu, kedepannya perlu adanya upaya cerdas dari Ittama guna meningkatkan capaian kapabilitas APIP ini, yaitu melalui penguatan praktik-praktik yang baik atas elemen-elemen kapabilitas APIP serta meningkatkan peran Ittama yang lebih efektif dalam mendukung pencapaian tujuan Setjen DPR RI.

Tidak tercapainya skor yang ditetapkan pada tahun 2023, disebabkan oleh adanya beberapa area yang harus diperbaiki yaitu: identifikasi kebutuhan SDM APIP

yang selaras dengan pelaksanaan pengawasan secara akurat dan berkala, serta melaksanakan proses rekrutmen serta penempatan dan pola mutasi SDM APIP, pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil peningkatan kualitas baik telaah sejawat intern maupun ekstern, penyusunan laporan ikhtisar hasil pengawasan kepada Pimpinan K/L sesuai dengan PermenPANRB Nomor 42 Tahun 2011, pelaksanaan audit ketaatan difokuskan pada area yang terdapat risiko ketidaktaatan, pelaksanaan audit kinerja dengan mengidentifikasi dan menilai risiko strategis dan operasional, penguatan asurans dan evaluasi berkelanjutan.

Adapun, Kegiatan-kegiatan dalam rangka upaya pencapaian “Tingkat Penilaian Kapabilitas APIP” menggunakan pagu anggaran di Inspektorat Utama sebesar Rp1.724.628.000 terealisasi 99,60% dengan capaian target indikator hanya tercapai 98,23%. Penggunaan anggaran sebisa mungkin efektif dan efisien dengan menggabungkan beberapa kegiatan menjadi satu kegiatan dan penggunaan *link gdrive* dalam pengumpulan bukti/eviden terkait kapabilitas APIP. Berikut adalah kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2023, antara lain:

1. Inspektorat Utama melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka Evaluasi Penilaian Kapabilitas APIP (IACM) dengan Tim Evaluasi BPKP.
2. *Benchmarking* Peningkatan Kapabilitas APIP atau IACM dan Maturitas SPIP ke Lombok Tengah, Lombok Barat, Provinsi NTB.
3. Tim Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Melalui Internal Audit Capability Model (IACM) Tahun Anggaran 2023.
4. *Benchmarking/Knowledge Sharing* dengan tema Peningkatan Manajemen Risiko dan Pengendalian Gratifikasi ke Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Peningkatan Kapabilitas APIP atau Internal Audit Capability Model (IACM) ke Inspektorat Daerah Kota Tomohon.
5. Melaksanakan kegiatan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP (IACM) Tahun 2023.
6. Melaksanakan rapat secara daring dengan BPKP dalam rangka Penyampaian Hasil IACM Tahun 2022 pada APIP Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI yang dilaksanakan pada tahun 2023.



Gambar 24. Kegiatan upaya pencapaian kapabilitas APIP/IACM

3.2. Realisasi Anggaran

Inspektorat Utama melaksanakan program dan kegiatan pengawasan di Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun Anggaran 2023 didukung dengan Pagu Anggaran sebesar Rp9.141.368.000,00 (sembilan milyar seratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) terdiri dari Inspektorat I dengan Pagu Anggaran sebesar Rp3.389.598.000,00 (tiga milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah), dan Inspektorat II dengan Pagu Anggaran sebesar Rp5.751.770.000,00 (lima milyar tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pagu Anggaran Inspektorat II sejumlah Rp5.751.770.000,00 terdiri dari pagu anggaran Inspektur Utama sebesar Rp3.854.836,000,00 (tiga milyar delapan ratus lima puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan pagu anggaran Inspektorat II sebesar Rp1.896.934.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Berikut adalah realisasi anggaran Inspektorat Utama Tahun 2023:

Unit	Pagu Awal	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian
Inspektorat I	Rp3.389.598.000,00	Rp3.388.368.348,00	Rp1.229.652,00	99,96%
Inspektorat II	Rp1.896.934.000,00	Rp1.896.930.793,00	Rp3.207,00	100%
Inspektur Utama	Rp3.854.836.000,00	Rp3.846.407.930,00	Rp8.428.070,00	99,78%
Total	Rp9.141.368.000,00	Rp9.131.707.071,00	Rp9.660.929,00	99,89%

Tabel 25. Anggaran Inspektorat Utama pada Tahun 2023

Dari data di atas, secara keseluruhan anggaran ittama terserap sebesar 99,89%, yang terdiri dari anggaran Inspektorat I telah terserap sebanyak 99,96% dengan seluruh target yang ada di Perjanjian Kinerja telah tercapai, begitu pula dengan anggaran Inspektorat II telah terserap 100% dengan seluruh target di

Perjanjian Kinerja tercapai sempurna, sedangkan untuk anggaran Inspektur Utama terserap sebesar 99,78% dengan 4 (empat) dari 10 (sepuluh) Indikator kinerja yang tidak tercapai, hal ini disebabkan oleh adanya perubahan regulasi/kebijakan, yang membuat ittama harus dapat membuat strategi/terobosan baru dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tersebut. Meskipun demikian 4(empat) target yang tidak tercapai tersebut, capaiannya tidak terlalu jauh dari target yang telah ditetapkan. Berikut adalah rincian capaian realisasi anggaran secara detail:

3.2.1 Inspektorat I

Rincian realisasi anggaran Inspektorat I dapat dijelaskan pada tabel berikut.

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	Layanan Pengembangan APIP	Rp2.286.180.000,00	Rp2.285.374.968,00	99,96%
2	Layanan Koordinasi Inspektorat I	Rp1.080.818,000,00	Rp1.080.393.380,00	99,96%
3	Layanan Audit Internal	Rp22.600.000,00	Rp.22.600.000,00	100%
Total		Rp3.389.598.000,00	Rp3.888.368.348,00	99,96

Tabel 26. Realisasi Penggunaan Anggaran Inspektorat I

Berdasarkan data di atas, penggunaan anggaran Inspektorat I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 digunakan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

1. Layanan Pengembangan APIP

- a. Kegiatan *knowledge sharing* dan peningkatan kapabilitas menggunakan anggaran sebesar Rp1,445,576,000,00.
- b. Kegiatan audit, reviu, pengawasan lainnya menggunakan anggaran sebesar Rp839,798,968,00.

2. Layanan Koordinasi Inspektorat I

- a. Penyusunan program menggunakan anggaran sebesar Rp944.802.380,00.
- b. Penyusunan Renja/Laporan Kinerja/PKPT menggunakan anggaran sebesar Rp135.636.000,00.

3. Layanan Audit Internal

Kegiatan probity audit/pemantauan/pendampingan menggunakan anggaran sebesar Rp22.600.000,00

3.2.2 Inspektorat II

Rincian realisasi anggaran Inspektorat II dapat dijelaskan pada tabel berikut.

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1.	Layanan Pengembangan APIP	Rp1.472.545.234,00	Rp1.472.545.234,00	100%
2.	Layanan Koordinasi Inspektorat II	Rp32.736.480,00	Rp32.736.480,00	100%
3.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp12.907.176,00	Rp12.907.176,00	100%
4.	Layanan Audit Internal	Rp52.023.107,00	Rp52.019.900,00	100%
5.	Layanan Pembangunan <i>Fraud Control Plan</i>	Rp326.722.003,00	Rp326.722.003,00	100%
Total		Rp1.896.934.000,00	Rp1.896.930.793,00	100%

Tabel 27. Realisasi Penggunaan Anggaran Inspektorat II

Berdasarkan data di atas, Penggunaan Anggaran Inspektorat II sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 digunakan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

1. Layanan Pengembangan APIP
 - a. Kegiatan Pengembangan Kapabilitas menggunakan anggaran sebesar Rp504.014.804,00 dari pagu sebesar Rp504.014.804,00 dan
 - b. Kegiatan *Knowledge Sharing* menggunakan anggaran sebesar Rp968.530.430,00 dari pagu sebesar Rp968.530.430,00
2. Layanan Koordinasi Inspektorat II
 - a. Kegiatan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024 menggunakan anggaran sebesar Rp630.000,00 dari pagu sebesar Rp630.000,00 dan
 - b. Kegiatan Koordinasi Internal Inspektorat II menggunakan anggaran sebesar Rp32.106.480,00 dari pagu sebesar Rp32.106.480,00.
3. Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah menggunakan anggaran sebesar Rp12.907.176,00 dari pagu sebesar Rp12.907.176,00.

4. Layanan Audit Internal
 - a. Kegiatan Audit menggunakan anggaran sebesar Rp6.900.000,00 dari pagu sebesar Rp6.900.000,00.
 - b. Kegiatan Reviu menggunakan anggaran sebesar Rp9.815.000,- dari pagu sebesar Rp9.815.000,00.
 - c. Kegiatan Evaluasi menggunakan anggaran sebesar Rp22.555.000,- dari pagu sebesar Rp22.555.000,00.
 - d. Kegiatan pengawasan lainnya menggunakan anggaran sebesar dari pagu Rp12.749.900,00 sebesar Rp12.753.107,00.
5. Layanan Pembangunan *Fraud Control Plan*
Kegiatan Pembangunan *Fraud Control Plan* berbasis SiCantik (Sistem Pencegahan Tindak Pidana Korupsi) menggunakan anggaran sebesar Rp326.722.003,00 dari pagu sebesar Rp326.722.003,00.

Berdasarkan data di atas, penggunaan Anggaran Inspektorat II sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 paling banyak digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Layanan Pengembangan APiP. Sedangkan Berdasarkan data penugasan PKPT dan Non PKPT telah dilaksanakan sebanyak 180 (seratus delapan puluh) surat tugas selama tahun 2023, berikut adalah rekapitulasi jumlah penugasan:

No	Keterangan	Total ST
1	Penugasan yang terlaksana sesuai PKPT Tahun 2023	119
2	Penugasan yang tidak terlaksana	19
3	Penugasan Non PKPT Tahun 2023	42
Total ST		180

Tabel 28. Rekapitulasi Penugasan Tahun 2023

3.2.3 Inspektur Utama

Rincian realisasi anggaran Inspektur Utama dapat dijelaskan pada tabel berikut.

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1.	Layanan koordinasi Inspektorat Utama	Rp2.981.316.000,00	Rp2.974.363.530,00	99,77%
2.	Layanan Perkantoran	Rp873.520.000,00	Rp872.044.400,00	99,83%
Total		Rp3.854.836.000,00	Rp3.846.407.930,00	99,78%

Tabel 29. Realisasi Penggunaan Anggaran Inspektur Utama

Berdasarkan data di atas, penggunaan anggaran Inspektorat Utama sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 digunakan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan penyusunan program kerja, renja/laporan kinerja/lainnya menggunakan anggaran sebesar Rp844.061.000,00.
2. Kegiatan koordinasi penyelesaian TLHP menggunakan anggaran sebesar Rp245.200.000,00.
3. Kegiatan koordinasi peningkatan kapabilitas APIP/IACM dan maturitas SPIP menggunakan anggaran sebesar Rp1.717.675.530,00.
4. Kegiatan koordinasi pemantauan dan evaluasi PMPRB, PMPZI dan AKIP menggunakan anggaran sebesar Rp371,449,000,00.
5. Kegiatan koordinasi pemantauan LHKPN/LHKASN/Gratifikasi/WBS/SMAP menggunakan anggaran Rp51.110.000,00.
6. Kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor menggunakan anggaran Rp872.044.400,00 dari pagu anggaran sebesar Rp873.520.000,00.

BAB IV

PENUTUP


Laporan Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dan upaya-upaya yang dilakukan dalam mencapai sasaran program Inspektorat Utama Tahun 2023. Sebagian besar capaian kinerja Inspektorat utama telah tercapai, dari 10 (sepuluh) indikator kinerja, 3 (tiga) indikator telah mencapai target dan 3 (tiga) indikator melebihi target dan 4 (empat) belum sesuai target. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Indikator yang telah mencapai target 100% adalah Jumlah Unit Kerja yang Mendapatkan Predikat WBK, Tingkat Kepatuhan LHKPN dan LHKASN.
2. Indikator yang telah melebihi target perjanjian kerja adalah Skor Maturitas SPIP dengan capaian 101,55%, Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan BPK sebesar 101,85% dan Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan APIP dengan capaian 120,89%.
3. Indikator yang belum mencapai target perjanjian kerja adalah Indeks Reformasi Birokrasi dengan capaian 89,51%, Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan capaian 89,95%, Nilai Evaluasi AKIP di Lingkup Inspektorat Utama sebesar 96,20% serta Tingkat Penilaian Kapabilitas APIP sebesar 98,23%.

Dengan capaian yang telah diraih pada tahun 2023, secara umum Ittama telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya, menggunakan anggaran dengan efektif dan efisien serta mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, selain itu, ittama telah berhasil menyelesaikan kerugian negara dari hasil pemeriksaan BPK dan menyetorkan uang ke negara selama tahun 2023 sejumlah Rp1.193.105.850,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta seratus lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah). Kedepannya, Ittama akan melakukan langkah strategis guna mencapai sasaran program di tahun 2024 yaitu:

1. Penguatan Tata Kelola Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi.
2. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko yang disesuaikan dengan struktur penganggaran.
3. Penguatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Utama yang berkualitas.
4. Peningkatan Kualitas Laporan Hasil Pengawasan Internal yang dapat dipertanggungjawabkan.

LAMPIRAN



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SATKER SETJEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Mohammad Djazuli, M.Si.
Jabatan : Pih. Inspektur Utama

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si.
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPR RI

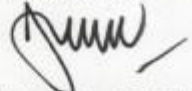
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

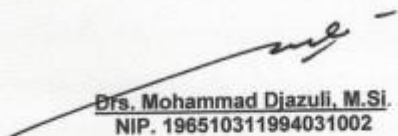
Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Oktober 2023
Pihak Pertama,

Pihak Kedua,


Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si.
NIP. 19661114 199703 1 001


Drs. Mohammad Djazuli, M.Si.
NIP. 196510311994031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	1. Indeks Reformasi Birokrasi	A (87,20)
		2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (75,00)
		3. Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK	5
		4. Tingkat kepatuhan LHKPN	100%
		5. Tingkat kepatuhan LHKASN	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	1. Skor Maturitas SPIP	Level 3 (3,22)
3.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	1. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK	89%
		2. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP	67%
4.	Meningkatnya kualitas dan kapabilitas organisasi Inspektorat Utama	1. Nilai Evaluasi AKIP di lingkup Inspektorat Utama	BB (75,00)
		2. Tingkat penilaian kapabilitas APIP	Level 3 (3,1)

Program	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp9.141.368.000,00

Sekretaris Jenderal,

Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si.
NIP. 19661114 199703 1 001

Jakarta, 5 Oktober 2023
Plh. Inspektur Utama,

Drs. Mohammad Djazuli, M.Si.
NIP. 196510311994031002





**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : 027.A/PI.02/I/2024

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI pada Tahun Anggaran 2024, maka dipandang perlu untuk menugaskan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional Auditor, dan Pejabat Pelaksana Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI;
- b. bahwa penugasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Tugas.
- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Standar Pengawasan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 12 Tahun 2023.

Dengan ini memberi tugas :

Kepada :

No.	Nama/NIP	Jabatan	Peran	Hari Penugasan
1.	Drs. Mohammad Djazuli, M.Si. NIP. 19651031 199403 1 002	Inspektur I	Penanggung Jawab	5 hari
2.	Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn NIP. 19681125 199302 2 001	Inspektur II	Pengarah	5 hari
3.	Endah Sri Lestari, S.H., M.Si. NIP. 19710403 199603 2 001	Kepala Bagian Administrasi Inspektorat Utama	Ketua Tim	5 hari
4.	Vita Fathiyah Yuniati, S.E., M.Ak. NIP. 198106082009122001	Kepala Subbagian Tindak Lanjut dan Pelaporan Inspektorat Utama	Sekretaris	5 hari

No.	Nama/NIP	Jabatan	Peran	Hari Penugasan
5.	Susriyanto, S.T., M.M NIP. 19760305 199803 1 001	Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat Utama	Anggota Tim	5 hari
6.	Suretianto, S.Kom., QGIA, QIA NIP. 19820322 200502 1 002	Auditor Ahli Pertama	Auditor	5 hari
7.	Antonius Deryal Gamanno, S.E., QGIA NIP. 19930728 201802 1 001	Auditor Ahli Pertama	Auditor	5 hari
8.	Sri Nastiti Tri Nurasih, S.E. NIP. 19680908 198803 2 001	Penyusun Bahan Kebijakan	Anggota Tim	5 hari
9.	Haryanti NIP. 19720417 199203 2 001	Penyusun Bahan Kebijakan	Anggota Tim	5 hari
10.	Alisa Fatimah, S.E. NIP. 19890629 201903 2 002	Penyusun Bahan Kebijakan	Anggota Tim	5 hari
11.	Muhammad Ilham Antariksa, S.E. NIP. 19940603 201903 1 002	Penyusun Bahan Kebijakan	Anggota Tim	5 hari
12.	Zelka Sevrina, S.E. NIP. 19940908 201903 2 002	Penyusun Bahan Kebijakan	Anggota Tim	5 hari
13.	Sri Hartati Agustin NIP. 19690806 199003 2 001	Pengelola Data	Anggota Tim	5 hari
14.	Mikhail Muhamad Jibril, A.Md., Ak. NIP. 19970302 201903 1 001	Pengelola Data	Anggota Tim	5 hari

Untuk : Melaksanakan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Inspektorat Utama Tahun 2023, pada tanggal 8 s.d. 12 Januari 2024. Dalam pelaksanaan penugasan, Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat Utama dilarang menerima gratifikasi dan wajib menyerahkan laporan maksimal 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya waktu penugasan.

Jakarta, 8 Januari 2024
Plh. Inspektur Utama


Drs. Mohammad Djazuli, M. Si.

Tabel Rentang Nilai Indeks Reformasi Birokrasi

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
		Angka	
1.	AA	> 90 - 100	Istimewa
2.	A	> 80 - 90	Memuaskan
3.	BB	> 70 - 80	Sangat Baik
4.	B	> 60 - 70	Baik, perlu sedikit perbaikan
5.	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6.	C	> 30 - 50	Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar
7.	D	> 0 - 30	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar

Tabel Rentang Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
		Angka	
1.	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	A	> 80 - 90	Memuaskan
3.	BB	> 70 - 80	Sangat Baik
4.	B	> 60 - 70	Baik
5.	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai)
6.	C	> 30 - 50	Kurang
7.	D	> 0 - 30	Sangat Kurang

Sumber : PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021

Tabel Pengukuran Nilai Indikator Kinerja Tingkat Penilaian Kapabilitas APIP

No.	Kategori	Interpretasi
1.	Level 1 : <i>Initial</i>	Tidak berkelanjutan, tergantung pada usaha individu
2.	Level 2 : <i>Infrastructure</i>	Prosedur dan praktik audit intern berulang dan berkelanjutan
3.	Level 3 : <i>Integrated</i>	Praktik profesional dan manajemen audit intern diterapkan secara seragam
4.	Level 4 : <i>Managed</i>	Audit intern mengintegrasikan informasi lintas unit organisasi untuk mengembangkan tata kelola dan manajemen risiko
5.	Level 5 : <i>Optimizing</i>	Audit intern belajar dari dalam dan luar organisasi untuk pengembangan yang berkelanjutan

Tabel Pengukuran Skor Maturitas SPIP

0 Belum Ada	K/L/P sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern.
1 Rintisan	Ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat <i>ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa</i> komunikasi dan pemantauan sehingga kelemahan tidak diidentifikasi.
2 Berkembang	K/L/P telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.
3 Terdefinisi	K/L/P telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.
4 Terkelola & Terstruktur	K/L/P telah menerapkan pengendalian internal yang efektif, <i>masing-masing personel pelaksana kegiatan</i> yang selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan K/L/P. Evaluasi formal dan terdokumentasi.
5 Optimum	K/L/P telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer.